



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 08119920254 Whatsapp 081902222210

Laman: banten.kemenkumham.go.id, surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

Nomor : W.12.PR.03 – 01 5 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten

Yth. Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI
di tempat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Demikian atas perkenannya, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

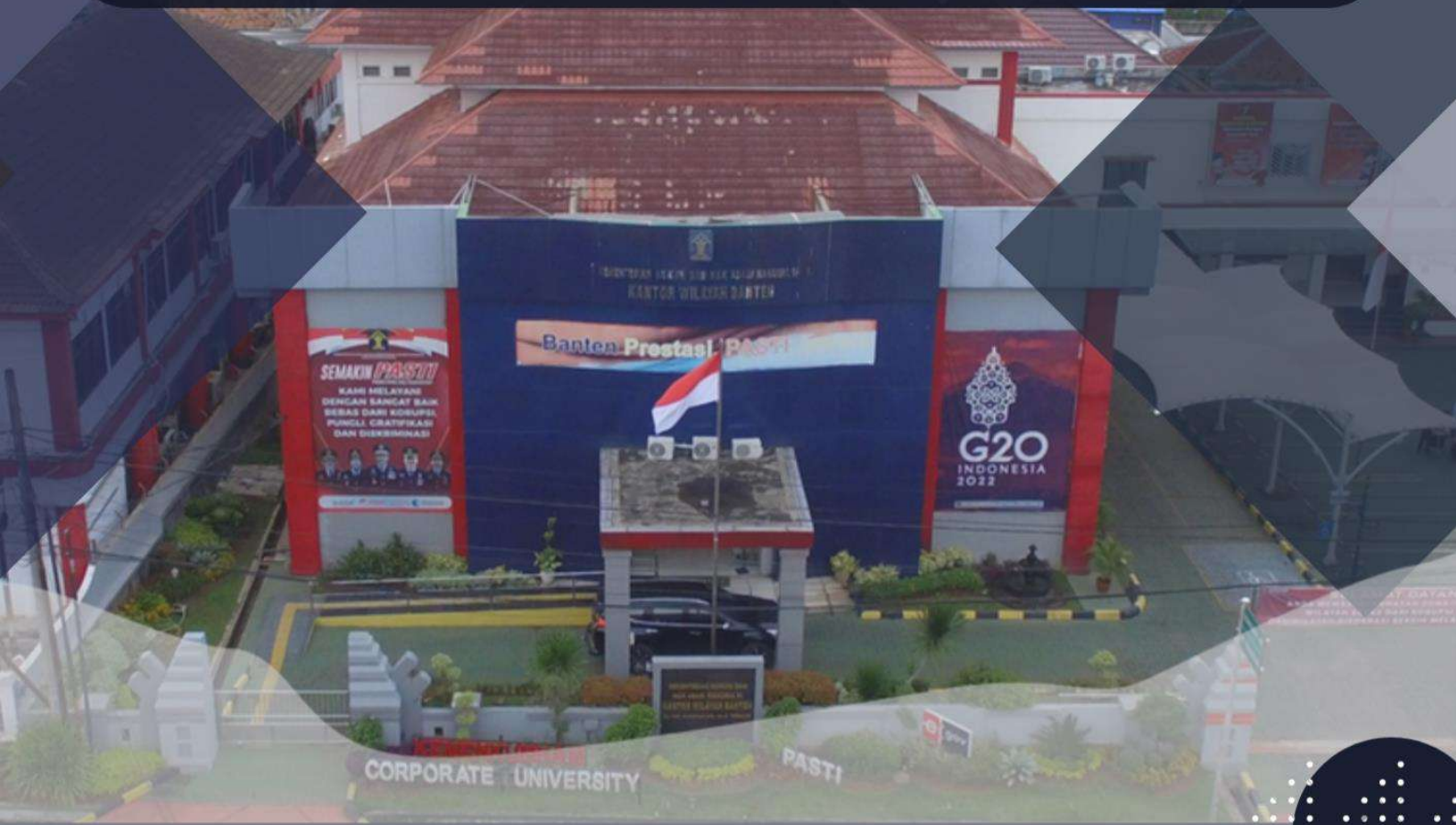
Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

Tembusan :

1. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BANTEN



LKJIP 2023

*Laporan Kinerja instansi Pemerintah
Tahun 2023*

☎ 081 199 202 54

🌐 banten.kemenkumham.go.id

✉ kanwil.banten@kemenkumham.go.id

📍 Jl. Brigjen KH. Sam'un No. 44 Serang

KATA PENGANTAR



Semangat reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tentunya tidak begitu sederhana, dibutuhkan manajemen perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan perbaikan secara terus-menerus guna mempercepat keberhasilan capaian kinerja.

Analisis, evaluasi dan tindaklanjut secara intens atas pelaksanaan kinerja menjadi fokus utama guna mencapai Akuntabilitas Kinerja yang berkualitas di Lingkungan Kantor Wilayah Banten yang kemudian direpresentasikan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Banten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai berdasarkan hasil analisis atas pengukuran kinerja.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada pengukuran hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hasil terhadap capaian kinerja tersebut, diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dimasa mendatang.

Serang, 31 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

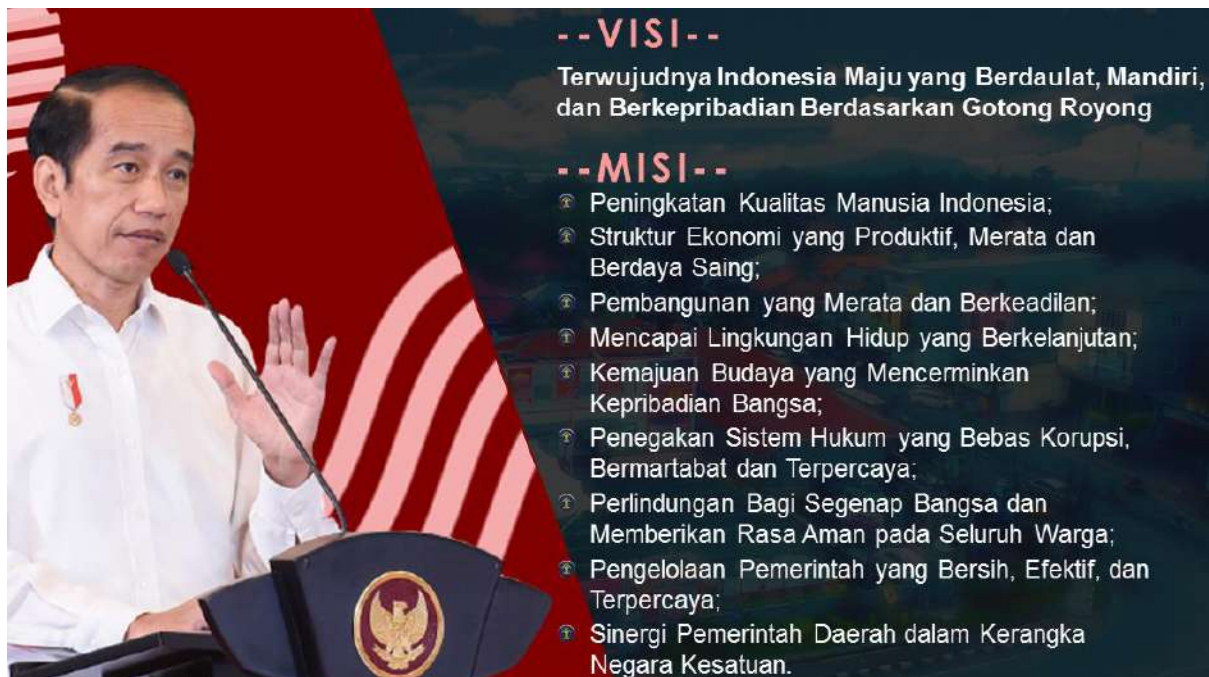
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
Maksud dan Tujuan	8
Aspek Strategis	8
Isu Strategis	9
Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Rencana Strategis	12
Sasaran Strategis	15
Perjanjian Kinerja	17
Program dan Anggaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
Capaian Kinerja Organisasi	24
Kantor Wilayah Banten	24
Divisi Administrasi	31
Divisi Yankum - Administrasi Hukum Umum	34
Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	38
Divisi Yankum - Peraturan Perundang-undangan	47
Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	51
Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia	62
Divisi Yankum - Balitbang Hukum dan HAM	69
Divisi Keimigrasian	73
Divisi Pemasyarakatan	77
Realisasi Anggaran	136
Kinerja Anggaran	138
Capaian Kinerja Lainnya	139
BAB IV PENUTUP	144
Kesimpulan	145
Saran Dan Rencana Tindak Lanjut	146

LAMPIRAN

EXECUTIVE SUMMARY

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Wilayah Banten mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



--VISI--
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

--MISI--

- 🕒 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 🕒 Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
- 🕒 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 🕒 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 🕒 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 🕒 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- 🕒 Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 🕒 Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 🕒 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Misi Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

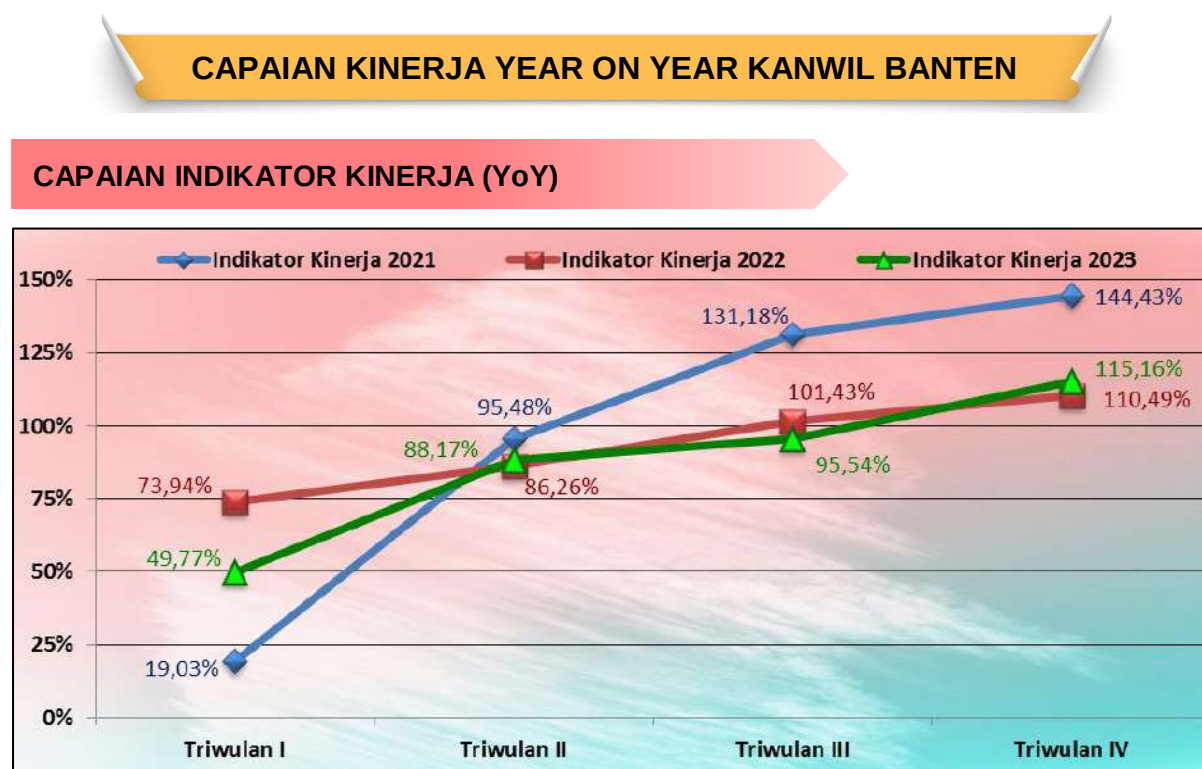
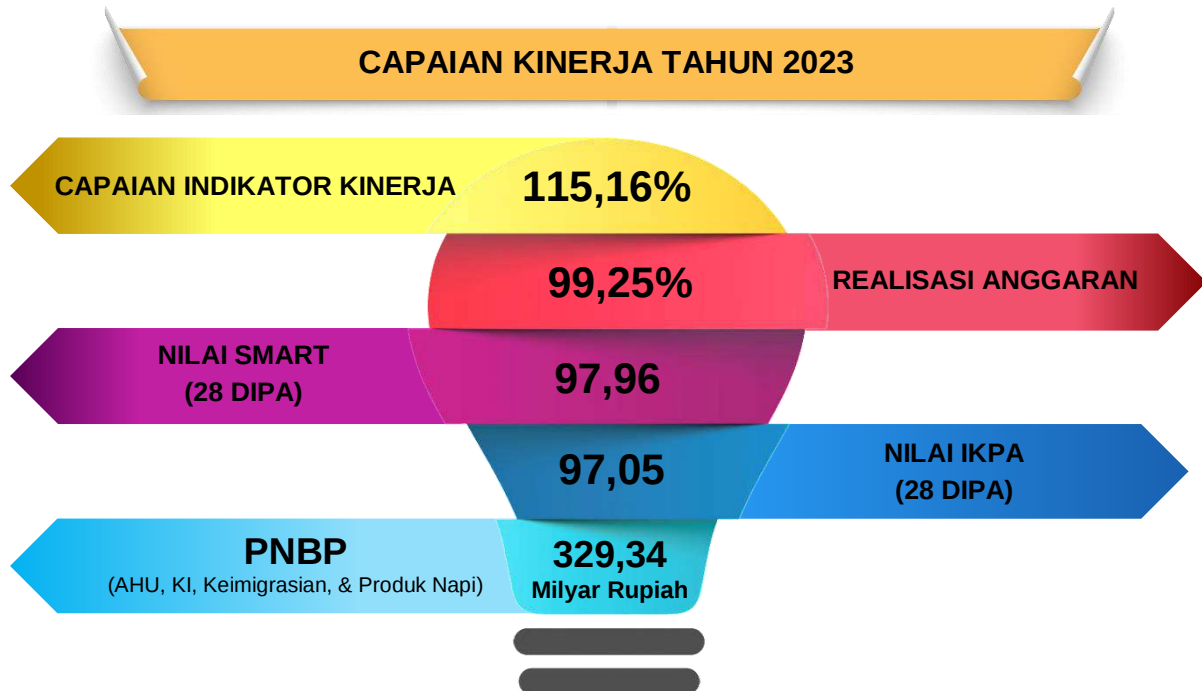
1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

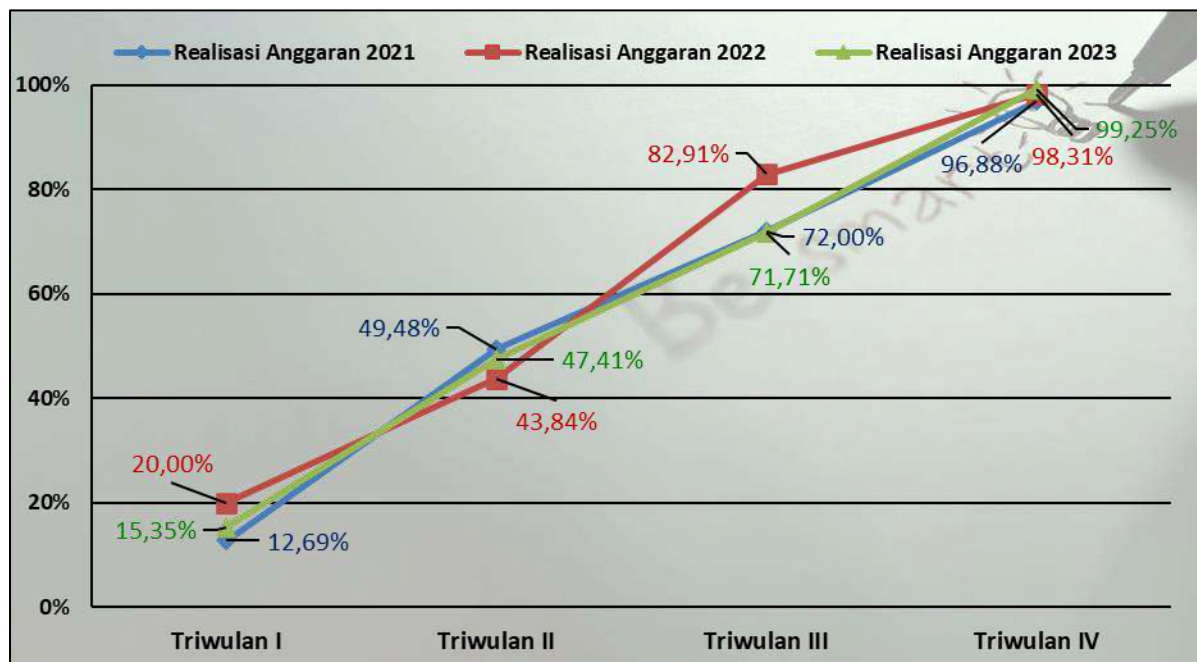
Selama periode Tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Banten. Dari total 61 target indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, sebanyak 59 indikator

kinerja telah tercapai bahkan melebihi target tahun 2023 sedangkan 2 indikator kinerja masih belum tercapai secara optimal. Jika melihat rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, maka hasil rata-rata capaian seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik yaitu sebesar **115,16%** dengan realisasi anggaran sebesar **99,25%** dan nilai kinerja anggaran berdasarkan nilai SMART (bobot 60%) dan nilai IKPA (bobot 40%) sebesar **97,60**.



Berdasarkan data capaian kinerja secara *year on year* (YoY), capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten pada periode tahun 2023 mencapai 115,16% atau meningkat sebesar 4,67% dibanding capaian tahun 2022 yaitu sebesar 110,49%. Hal ini menunjukkan progress positif atas pencapaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten di tahun 2023.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (YoY)



Kemudian pada sisi Anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada tahun 2023 mencapai 99,25% atau meningkat sebesar 0,94% dibandingkan periode tahun 2022 yaitu sebesar 98,31%. Peningkatan tersebut merupakan dampak positif atas pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran secara berkala guna percepatan dan akselerasi kinerja anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Banten.

Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Banten telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan publik. Inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Banten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut Inovasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama Tahun 2023, antara lain :

INOVASI TAHUN 2023

JAWARA New Version



TEROBOSAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- ❖ Jawaara mengintegrasikan seluruh Pelayanan Hukum dan HAM yang dapat diakses kapan pun & dimanapun sehingga Masyarakat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi & pelayanan Hukum dan HAM
- ❖ Manfaat Aplikasi JAWARA menutup celah Korupsi , Pungli , dan Gratifikasi

M-HUKDIS



TEROBOSAN PEMBINAAN HUKUMAN DISIPLIN

M-Hukdis pada Aplikasi Sikap Jawaara merupakan media digitalisasi pelaksanaan Pembinaan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sehingga evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilakukan secara optimal

APOA - JAWARA



TEROBOSAN PENGAWASAN ORANG ASING

Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA Jawaara) berbasis web yang dapat diakses melalui browser digunakan sebagai sistem pelaporan orang asing untuk pemilik hotel atau penginapan dan pemilik mess perusahaan guna melaporkan orang asing yang menginap sehingga memudahkan pihak Keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing

PEPITO



TEROBOSAN LAYANAN KONSULTASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Aplikasi Pesan Pintar Otomatis (PEPITO) Kekayaan Intelektual adalah sebuah aplikasi balas pesan otomatis bagi pengguna WhatsApp. Aplikasi akan membalas pesan secara otomatis ketika pengguna memilih menu atau perintah tertentu untuk mendapatkan informasi seputar Kekayaan Intelektual

POSKO BANGKUMIS



TEROBOSAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM

Pos Konsultasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin/ tidak mampu merupakan program yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah Banten bersama Pemerintah Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum sehingga akses terhadap keadilan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

SIGUBOOK



TEROBOSAN PENCATATAN TAMU

- ❖ Mempermudah pengunjung dalam mengisi daftar tamu
- ❖ Mempermudah dalam pengumpulan dan penyortiran data pengunjung
- ❖ Membantu mengetahui jenis layanan yang sering dikunjungi

FACE SMART ACCESS LOCK



TEROBOSAN KEAMANAN AKSES PINTU MASUK

Kunci pintar otomatis berbasis sistem yang dapat merekam seseorang saat membuka atau mengunci pintu dengan deteksi wajah sehingga dapat meningkatkan keamanan dan berperan dalam monitoring disiplin pegawai serta sterilisasi ruangan dari pihak asing.

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada tahun 2023 ini sejalan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih di Lingkungan Kantor Wilayah Banten selama tahun 2023 diantaranya :

1. Penghargaan Anugerah Sahabat PWI Banten Tahun 2023



2. Penghargaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang atas Apresiasi Kerja Sama dan Dukungan Pelayanan Eazy Passport di KPKNL Tangerang I



3. Penghargaan Kanwil DJKN Provinsi Banten kepada Kanwil Banten atas Koordinator Wilayah dengan Tata Kelola Barang Milik Negara Terbaik Tahun 2022 di Provinsi Banten



4. Penghargaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang kepada Kanwil Banten sebagai Satuan Kerja dengan Penatausahaan BMN Terbaik Tahun 2022 di Wilayah Kerja KPKNL Serang



5. Penghargaan Ditjen Kekayaan Intelektual kepada Kanwil Banten sebagai Terbaik I pada Subkategori Kinerja Anggaran di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023



6. Penghargaan Ditjen Kekayaan Intelektual kepada Kanwil Banten sebagai Kantor Wilayah dengan Jumlah Pelaksanaan MIPC Terbanyak Tahun 2023



7. Penghargaan Ditjen HAM kepada Kanwil Banten sebagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong 8 Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2022



8. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Badan Publik “Informatif”



9. Penghargaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten atas Partisipasi Aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)



10. Penghargaan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Kanwil Banten sebagai Terbaik II Persentase Pertumbuhan, Pencapaian Target, dan Realisasi PNPB Tahun 2021 – 2023



11. Penghargaan It Works.id kepada Kanwil Banten sebagai TOP Digital Implementation 2023



12. Penghargaan Kanwil DJPB Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Kategori Satker UAPPA-W Besar Penghargaan Atas Hasil Telaahan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Banten Tahun 2022



13. Penghargaan Kanwil DJPB Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Peringkat Kedua Satker dengan capaian IKPA tertinggi bulan Oktober 2023 Kategori Pagu Kecil <25M dengan nilai IKPA 100



14. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kanwil Banten atas Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023



15. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Banten atas Partisipasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Instansi Vertikal di Provinsi Banten



Hasil pencapaian kinerja, inovasi dan prestasi yang telah diraih Kantor Wilayah Banten merupakan wujud nyata atas peran aktif Kantor Wilayah Banten dalam memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan layanan Hukum dan HAM di Wilayah Banten. Diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi Kementerian Hukum dan HAM RI serta masyarakat luas.

BAB 1

PENDAHULUAN

Menyajikan uraian singkat tentang latar belakang dan gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis dan isu strategis organisasi, serta sistematika penyusunan laporan kinerja.

PENGAYOMAN

LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang pemasyarakatan, dan bidang keimigrasian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka disusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

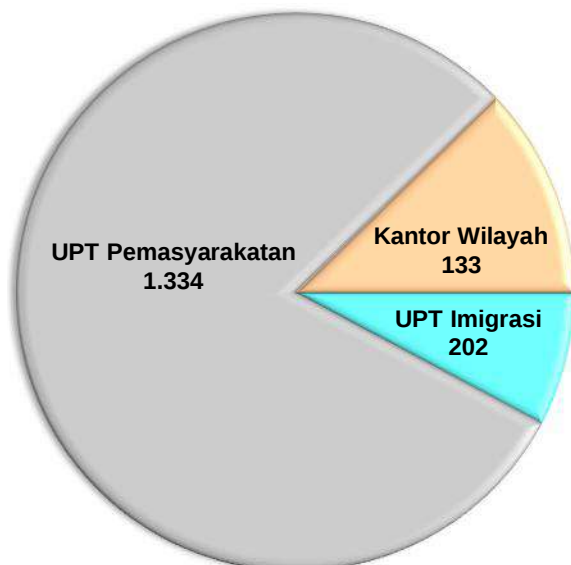
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya

hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Banten di dukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Banten berjumlah 1.669 orang, dimana 133 orang diantaranya merupakan pegawai pada Kantor Wilayah Banten. Berikut data sebaran pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten :

PEGAWAI PADA SATUAN KERJA**PEGAWAI KANTOR WILAYAH BANTEN**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi, yaitu :

1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diantaranya :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tangerang
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir
10. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang
11. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang
12. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang
13. Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
14. Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang
15. Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir
16. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Serang
17. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
18. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang
19. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri atas :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan

- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

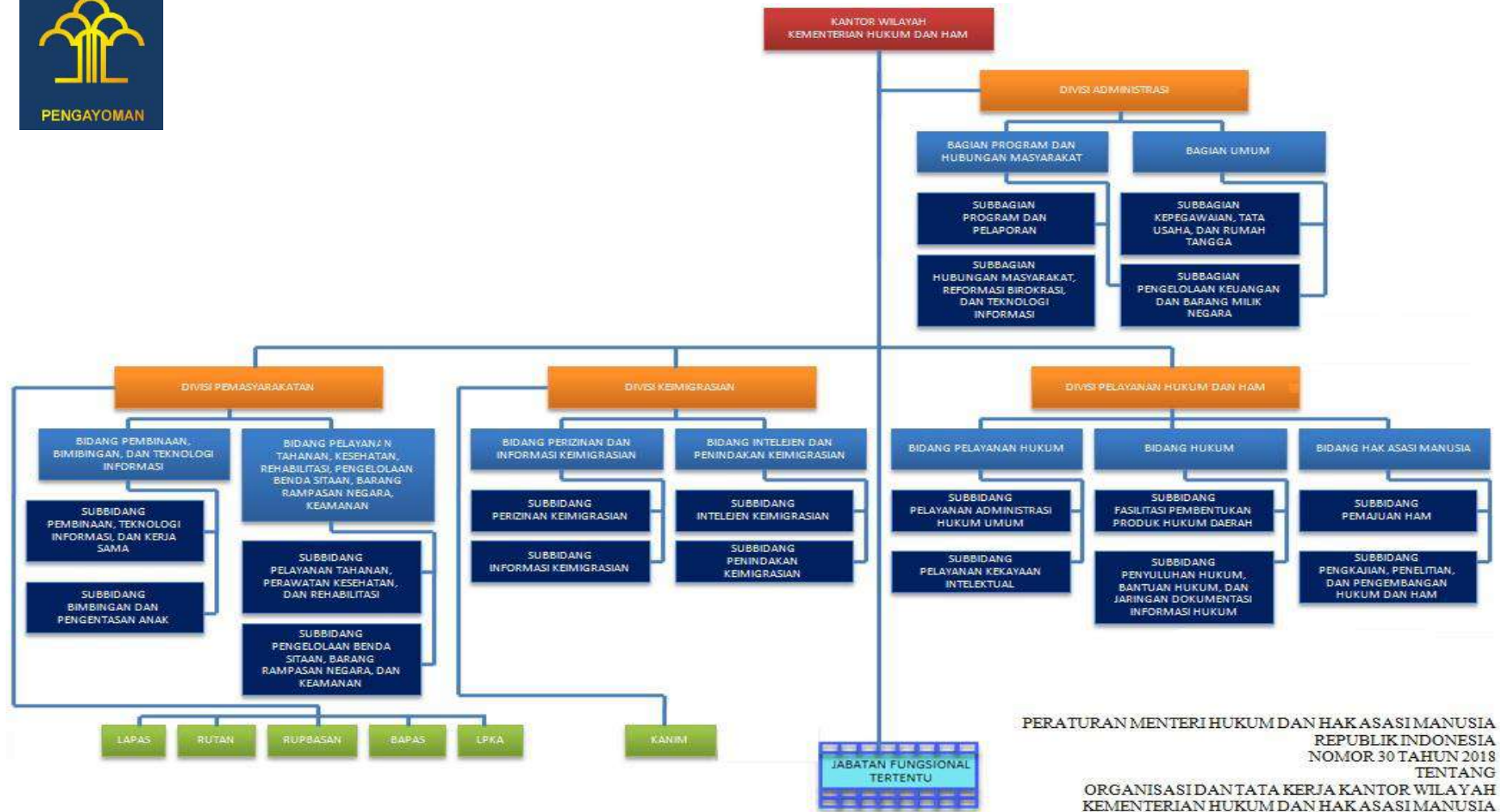
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, dan pejabat fungsional tertentu;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

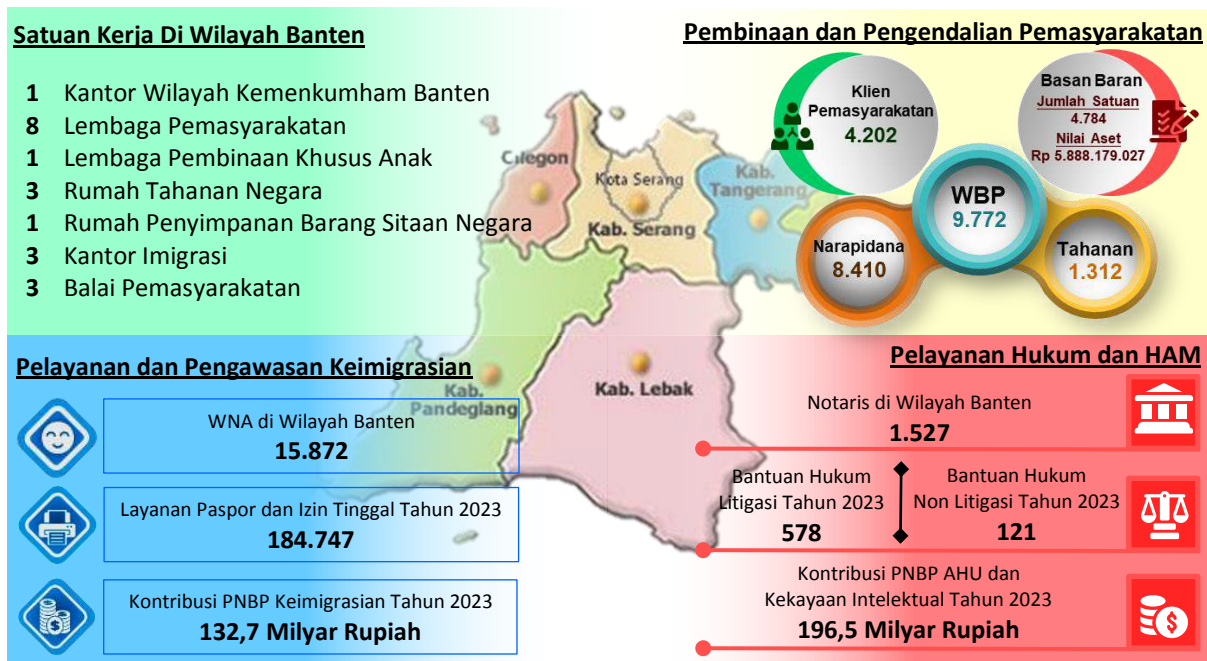


MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi serta dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

ASPEK STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Banten, Kantor Wilayah Banten berperan dalam menyediakan layanan Hukum dan HAM serta mengoptimalkan potensi keragaman dan kearifan lokal guna mendukung Visi dan Misi Presiden. Aspek strategis yang menjadi peran penting keberadaan Kantor Wilayah Banten dalam menyediakan pelayanan dan mengoptimalkan potensi di Wilayah Banten diantaranya :



ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2023, terdapat beberapa potensi kendala yang menjadi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Potensi Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pegawai tidak tepat waktu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Rendahnya Tingkat penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris
- Minimnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan KI
- Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum
- Rendahnya pengawasan terhadap WNA di Wilayah
- Tidak optimalnya pencegahan potensi gangguan Kamtib
- Terjadinya peredaran dan pengendalian narkoba serta penipuan online di dalam Lapas/Rutan

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Periode Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan uraian singkat tentang latar belakang dan gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis dan isu strategis organisasi, serta sistematika penyusunan laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan Visi dan Misi, Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja (penetapan rencana kegiatan yang akan dicapai yang berisi sasaran, Indikator Kinerja, dan alokasi anggaran)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Kinerja Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta strategi rencana kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan Visi dan Misi, Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja (penetapan rencana kegiatan yang akan dicapai yang berisi sasaran, Indikator Kinerja, dan alokasi anggaran)

PENGAYOMAN

RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “*Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju*”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.



--VISI--
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

--MISI--

- 📌 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 📌 Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
- 📌 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 📌 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 📌 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 📌 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- 📌 Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 📌 Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 📌 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Banten mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

--VISI--

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

--MISI--

- ④ Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- ④ Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- ④ Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- ④ Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
- ④ Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- ④ Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- ④ Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Misi Nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Misi Nomor 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara. Terakhir Misi Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga Misi Presiden tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Berdasarkan Visi, Misi, serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Misinya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

<u>MISI</u>	<u>TUJUAN</u>
1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas; 3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan; 5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; 7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.	1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kbutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima; 3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia; 4. Terlindunginya Hak Asasi Manusia; 5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan; 6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; 7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai ini mendukung saat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kami “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan, dan **I**novatif. Tata nilai Kami “**Pasti**” merupakan landasan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

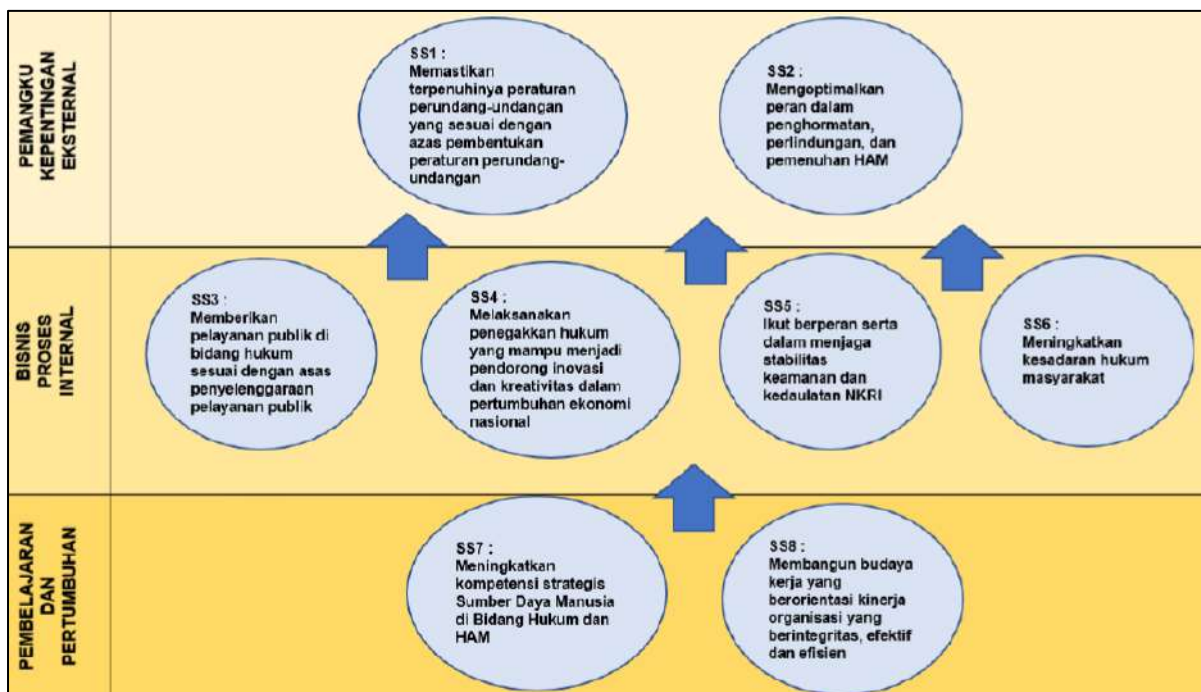
Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), terdapat 8 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2024 :

LANDASAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2020-2024

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
Nomor 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	1. Membentuk peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	SS1 : Memastikan terpenuhinya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
	Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel	2. Menyelenggara-kan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
	Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal	3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
Nomer 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
			SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

**SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BERDASARKAN PETA STRATEGI LEVEL ORGANISASI**



Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Kantor Wilayah Banten berupaya mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi hukum umum di Wilayah.
3. Pemajuan HAM di Wilayah.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum di Wilayah.
7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasyarakatan.

PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2023 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	PROGRAM/DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
1	Sekjen – Dukungan Manajemen	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1
2	Administrasi Hukum Umum	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan	86%

NO	PROGRAM/DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
		MKNW, MPW dan MPD	pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	
3	Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	143 Layanan
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
		Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Kegiatan
			Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan
4	Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
		Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%
			Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
			Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%
6	Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
			Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi

NO	PROGRAM/DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
		program aksi HAM		Pemerintah
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
		Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
			Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
8	Keimigrasian	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25
			Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13
9	Pemasyarakatan	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82
		Meningkatnya pelayanan tahanan di Wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
			Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%
			Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70%
			Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%
			Persentase narapidana yang dapatkan hak integrasi	85%
			Persentase Narapidana Yang	85%

NO	PROGRAM/DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
			Mendapatkan Hak Pendidikan	
			Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	17%
			Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%
			Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72%
			Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%
		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
			Persentase anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%
			Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%
		Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
			Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
			Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%
			Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
			Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
			Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%

NO	PROGRAM/DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
			Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%
			Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%
		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak, sesuai dengan standar	80%
			Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
			Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu Hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
			Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
			Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mandapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
			Persentase Tahanan/Narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
			Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Posistif (berhasil sembuh)	80%
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkotika	27%

PROGRAM DAN ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi kinerja anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	PROGRAM/DIPA	PAGU ANGGARAN
A	B	C
	Kantor Wilayah Banten	354.654.096.000
1	Setjen – Dukungan Manajemen	
	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	23.215.698.000
2	Administrasi Hukum Umum	
	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2.260.316.000
3	Kekayaan Intelektual	
	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.730.303.000
4	Peraturan Perundang-undangan	
	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	373.635.000
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	
	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah & Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	2.511.020.000
6	Hak Asasi Manusia	
	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	235.484.000
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	
	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	219.371.000
8	Keimigrasian	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	39.429.477.000
9	Pemasyarakatan	
	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	284.678.792.000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Kinerja Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja.

PENGAYOMAN

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

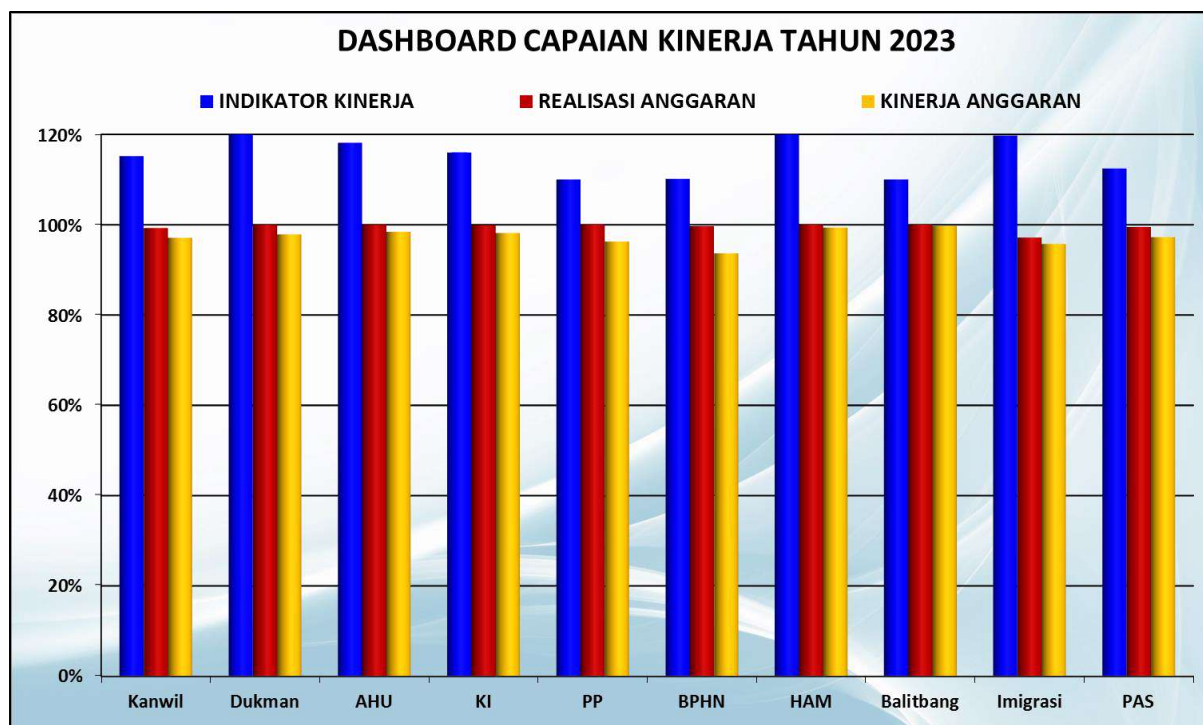
Pengukuran kinerja (*performance*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dan Realisasi anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Banten periode Tahun 2023, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :

KANTOR WILAYAH BANTEN

DASHBOARD CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	DIPA / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA			PERFORMANCE	EFISIENSI SUMBER DAYA
		INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KINERJA ANGGARAN		
A	B	C	D	E	$F = \frac{(C+D+E)}{3}$	G=C-D
A	Kantor Wilayah Banten	115,16%	99,25%	97,60%	104,00%	15,91%
1	Setjen - Dukungan Manajemen	120,00%	99,96%	96,48%	105,48%	20,04%
2	Adminstrasi Hukum Umum	118,14%	99,98%	98,59%	105,57%	18,16%
3	Kekayaan Intelektual	116,00%	99,88%	98,17%	104,68%	16,12%

NO	DIPA / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA			PERFORMANCE	EFISIENSI SUMBER DAYA
		INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KINERJA ANGGARAN		
A	B	C	D	E	$F = \frac{(C+D+E)}{3}$	G=C-D
4	Peraturan Perundang-undangan	110,00%	100,00%	96,27%	102,09%	10,00%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	110,14%	99,67%	97,49%	102,43%	10,47%
6	Hak Asasi Manusia	120,00%	100,00%	99,34%	106,45%	20,00%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	110,00%	100,00%	99,73%	103,24%	10,00%
8	Keimigrasian	119,74%	97,16%	96,64%	104,51%	22,59%
9	Pemasyarakatan	112,45%	99,47%	97,65%	103,19%	12,98%



Berdasarkan infografis pada dashboard capaian kinerja yang telah disajikan, dari jumlah 9 Program/DIPA pada Kantor Wilayah Banten diketahui seluruh Program/DIPA telah melebihi capaian indikator kinerja diatas 100% dengan rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 115,16%. Kemudian pada sisi anggaran, realisasi anggaran periode Tahun Anggaran 2023 telah tercapai sangat optimal yaitu sebesar 99,25%. Selanjutnya data capaian kinerja anggaran berdasarkan rata-rata dari nilai IKPA (bobot 40%) dan nilai SMART (bobot 60%) untuk periode tahun 2023 mencapai sebesar 97,6%. Sehingga diketahui *performance* Kantor Wilayah Banten berdasarkan hasil rata-rata dari capaian indikator kinerja, realisasi anggaran dan kinerja anggaran periode Tahun 2023 yaitu sebesar 104%.

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Banten mengemban 22 Sasaran Kegiatan dengan jumlah 61 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari jumlah 61 indikator kinerja tersebut, sebanyak 59 indikator kinerja telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2023 sedangkan terdapat 2 indikator kinerja yang masih belum tercapai secara optimal. Namun secara keseluruhan rata-rata capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten telah tercapai dengan baik yaitu sebesar 115,16%. Berikut capaian Indikator Kinerja Kantor Wilayah Banten Tahun 2023 :

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Kantor Wilayah Banten				115,16%
Setjen - Dukungan Manajemen				120,00%*
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,947	120,00%*
Administrasi Hukum Umum				118,14%
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	25,59%	120,00%*
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100,00%	116,28%
Kekayaan Intelektual				116,00%
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	143 Layanan	12.528	120,00%*
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	31	120,00%*
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Kegiatan	6	120,00%*

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	4	120,00%*
Peraturan Perundang-undangan				110,00%
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	120,00%*
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	12	100%
Badan Pembinaan Hukum Nasional				110,14%
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3	120,00%*
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	95,07%	115,94%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	83,45%	104,31%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75	77,18	100,56%
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	40%	120,00%*
Hak Asasi Manusia				120,00%*
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	9	120,00%*
	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	8	120,00%*
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	18	120,00%*
Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	10	120,00%*

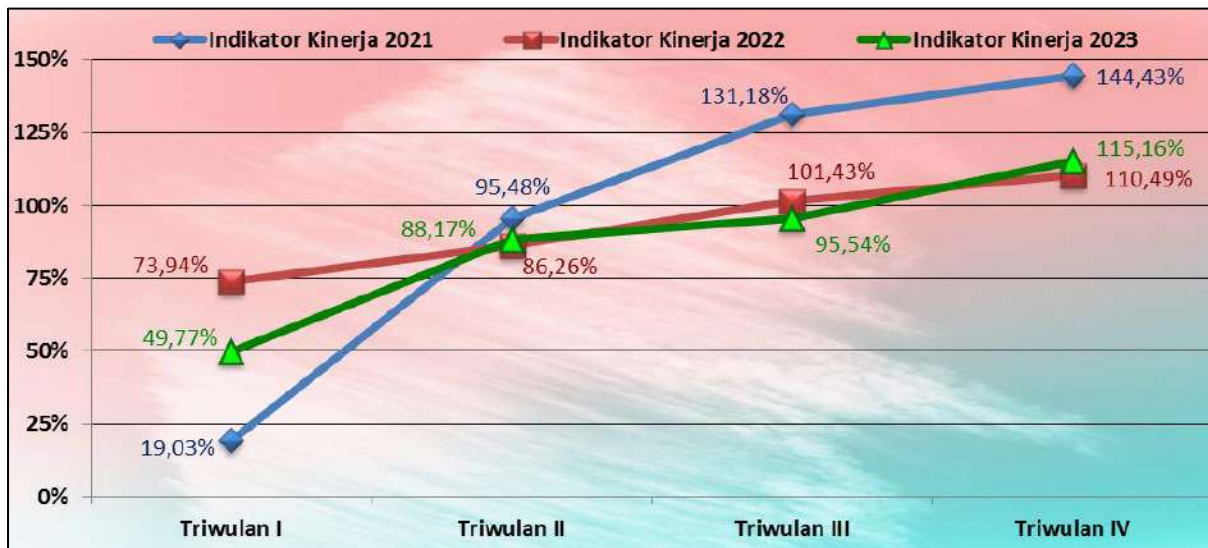
DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM				110,00%
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	120,00%*
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1	100%
Keimigrasian				119,74%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,95	120,00%*
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,74	119,49%
Pemasyarakatan				112,44%
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82	99,36	120,00%*
Meningkatnya pelayanan tahanan di Wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	111,11%
	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	100%	111,11%
	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	92,52%	102,80%
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	93,83%	120,00%*
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	98,85%	116,29%
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	73,04%	85,93%
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	23,08%	120,00%*
	Persentase narapidana yang	31%	100%	120,00%*

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi			
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	76,96%	106,89%
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30	114	120,00%*
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	99,01%	120,00%*
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%	111,11%	120,00%*
Meningkatnya pelayanan pembinaan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60,11%	100,18%
	Persentase anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	32,97%	120,00%*
	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	83,41%	120,00%*
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	120,00%*
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11%
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100%	111,11%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	120,00%*
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	85,06%	100,07%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100,00%	120,00%*

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,65%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	120,00%*
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85,06%	100,07%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100,00%	120,00%*
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak, sesuai dengan standar	80%	100%	120,00%*
	Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu Hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%
	Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	120,00%*
	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mandapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100,00%	117,65%
	Persentase Tahanan/Narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Posistif (berhasil sembuh)	80%	66,12%	82,65%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	120,00%*

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

**REALISASI INDIKATOR KINERJA YEAR ON YEAR (YoY)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**



Berdasarkan data capaian indikator kinerja *year on year* (YoY) Kantor Wilayah Banten, diketahui bahwa capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 115,16% telah meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 110,49% atau meningkat sebesar 4,67%. Hal ini menunjukkan progress positif atas pencapaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten di tahun 2023. Penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja di tahun 2023 telah diuraikan berdasarkan 9 Program/DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu sebagai berikut :

DIVISI ADMINISTRASI – DUKUNGAN MANAJEMEN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Setjen - Dukungan Manajemen				120,00%*
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,947	120,00%*

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal}}{\text{Target Indeks Kepuasan Layanan Internal}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,947}{3,1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 127,32\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%^*$$

Realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil Survei Integritas pegawai Kantor Wilayah Banten terkait layanan internal pada Kantor Wilayah Banten yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi : <https://survei.balitbangham.go.id/> dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Hasil rata-rata penilaian survei Integritas pada Kantor Wilayah Banten periode Januari – Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Satuan Kerja	Rata-rata Responden	Hasil Survei Integritas		Target	Capaian
		Skala (100)	Konversi Skala 4		
A	B	C	$D = (\frac{C}{100}) \times 4$	E	$F = \frac{D}{E}$
Kanwil Banten	126	98,69	3,947	3,1	120%*

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui nilai Integritas terkait layanan internal pada Kantor Wilayah Banten sebesar 3,947 (skala 4). Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan target indeks kepuasan layanan internal sebesar 3,1 atau telah mencapai 120,00%* dari target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,952	120,00%*	3,1	3,947	120,00%*

Berdasarkan data yang disajikan, Realisasi Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 3,952. Namun secara keseluruhan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2023 telah tercapai secara optimal yaitu sebesar 120%*, hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan internal pada Kantor Wilayah Banten telah memadai dan telah memenuhi kebutuhan pengguna layanan/pegawai.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi kinerja pada tahun 2023 atas Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah telah melebihi target yang ditetapkan pada 2024. Target di tahun 2024 adalah 3,1 Indeks, sedangkan realisasi di tahun 2023 sebesar 3,948 Indeks.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Banten dikarenakan nilai survey yang optimal dengan responden pegawai Kantor Wilayah Banten terhadap layanan-layanan internal pada Kantor Wilayah Banten, diantaranya :

- Tersedianya dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN, dan Kerumahtanggaan
- Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai
- Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung hasil pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja dan anggaran, pembinaan dan penguatan pembangunan Zona Integritas, dan Pembinaan Kepegawaian melalui pelaksanaan apel, *coaching & mentoring*, *Corporate University*, dan *Hospitality*.
- Transformasi pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi informasi yaitu Sistem JAWARA sebagai pengganti Layanan Tatap Muka di Pusat Layanan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Banten sehingga dapat memudahkan masyarakat pengguna layanan dimanapun dan kapanpun.

- Pelaksanaan pembinaan hukuman disiplin pegawai melalui sistem M-Hukdis agar pembinaan lebih terarah dan tertata dengan baik serta efektif dan efisien.
- Implementasi inovasi SINOBITA untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan atas publikasi berita baik pada Kantor Wilayah maupun pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
- Optimalisasi tingkat keamanan ruang perkantoran melalui inovasi *face smart access lock*, ketersediaan CCTV, alarm *panic button*, & alat pemadam kebakaran.
- Pelaksanaan Kamis Taqwa dan ketersediaan fasilitas alat kebugaran (Gym) dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani pegawai Kantor Wilayah Banten.

DIVISI YANKUM – ADMINISTRASI HUKUM UMUM

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Administrasi Hukum Umum				118,14%
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	25,59%	120,00%*
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100,00%	116,28%

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase peningkatan PNBP}}{\text{Target Persentase peningkatan PNBP}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{25,59}{5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 511,8\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Berdasarkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Banten diketahui pada periode tahun 2023 mengalami peningkatan PNBP sebesar 25,59% dibandingkan dengan realisasi rata-rata PNBP periode tahun 2020-2022. Jika melihat target yang ditetapkan yaitu peningkatan PNBP tahun 2023 sebesar 5%, maka capaian indikator kinerja tersebut telah mencapai 511,8% dengan konversi capaian menjadi 120%*. Penjelasan realisasi peningkatan PNBP AHU diuraikan sebagai berikut :

Realisasi PNBP			
2020	2021	2022	Rata-Rata
A	B	C	$D = \frac{A+B+C}{3}$
103.025.950.000	152.605.950.000	176.149.700.000	143.927.200.000

2020-2022	2023	Kenaikan		Capaian Kinerja	
Rata-rata Realisasi PNBP	Realisasi PNBP	Kenaikan PNBP	%	Target Kenaikan PNBP	Capaian
A	C	D = C-B	$E = \frac{D}{B}$	F	$G = \frac{E}{F}$
143.927.200.000	180.764.850.000	35.038.150.000	25,59%	5%	120%*

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	15,43%	120,00%*	5%	25,59%	120%*

Berdasarkan data yang disajikan, Realisasi pada periode 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,16% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,43%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja AHU di Wilayah telah dilaksanakan dengan sangat optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi kinerja periode tahun 2023 atas Persentase peningkatan PNBP

Administrasi Hukum Umum di Wilayah telah jauh melampaui target tahun 2024 yaitu sebesar 5%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan yang menunjang keberhasilan diantaranya melaksanakan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum dengan materi seputar Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Perseroan Perorangan, dan juga Apostille.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Pengawasan penerapan PMPJ oleh Tm Audit Pengawas Kepatuhan kepada Notaris di Wilayah
- Pelaksanaan diseminasi layanan Perseroan Perorangan
- Pelaksanaan diseminasi layanan Kewarganegaraan & Pewarganegaraan
- Pelaksanaan diseminasi layanan Partai Politik
- Pelaksanaan diseminasi layanan Apostille

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase penyelesaian laporan pengaduan}}{\text{Target penyelesaian laporan pengaduan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{86\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 116,28\%$$

Pada periode tahun 2023, realisasi indikator kinerja jumlah persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah telah mencapai 100%. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 86%, maka capaian kinerja atas indikator kinerja tersebut telah tercapai sebesar 116,28%. Jumlah realisasi penyelesaian

laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada tahun 2023 sebagai berikut:

Laporan Pengaduan			Penyelesaian Pengaduan				Capaian Kinerja	
MPD	MPW	Jumlah	MPD	MPW	Jumlah	%	Target	Capaian
A	B	C = A+B	C	D	E = C+D	$F = \frac{E}{C}$	G	$H = \frac{F}{G}$
15	9	24	15	9	24	100%	86%	116,28%

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	40%	47,62%	86%	100%	116,28%

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 40%, realisasi pada periode tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan progress positif dalam perbaikan dan percepatan pencapaian kinerja di tahun 2023 terhadap indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	84%	86%	88%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian kinerja periode tahun 2023 atas persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah telah mampu melampaui target di tahun 2024 yaitu sebesar 88%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Dalam pelaksanaan indikator kinerja, terdapat kendala yang bersifat *uncontrollable* dan sebagian besar berasal dari eksternal (pihak luar) yaitu sulit terpenuhinya unsur majelis (Akademisi, Notaris, Pemerintah) dalam sidang pemeriksaan MPW dikarenakan kesibukan profesi, sehingga rendahnya tingkat penyelesaian atas laporan pengaduan Notaris. Selain itu, sebagian besar jumlah pelaksanaan sidang untuk setiap kasus melebihi batas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu melebihi 2 kali pelaksanaan sidang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya Pelaksanaan Sosialisasi Beneficial Ownership, Sosialisasi PMPJ, Rapat Evaluasi MPW, koordinasi dengan MPD, serta melakukan sidang secara berkala pada hari Selasa dan Kamis setiap minggunya.

DIVISI YANKUM – KEKAYAAN INTELEKTUAL

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Kekayaan Intelektual				116,00%
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	143 Layanan	12.528	120,00%*
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	31	120,00%*
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Kegiatan	6	120,00%*
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	4	120,00%*

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi}}{\text{Target Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{12.528}{143} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 8.760,84\%$$

$$\text{Konversi capaian} = 120\%^*$$

Untuk mencegah anomali hasil capaian kinerja agar *relevant* dengan outcome yang ingin dicapai berdasarkan konsep SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*) maka seluruh hasil capaian kinerja menerapkan konversi 120 atau batas maksimal capaian sebesar 120%. Oleh karena itu, hasil capaian indikator kinerja jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah periode 2023 sebesar 120%*. Berikut rincian data capaian kinerja hingga periode tahun 2023 :

Jenis Permohonan	Jumlah	Realisasi	PNBP	Target	Capaian
A	B	C	D	E	F = $\frac{C}{E}$
Paten	65	12.528	15.759.260.000	143	120%*
Hak Cipta	4.303				
Merek	7.907				
Desain Industri	253				
Rahasia Dagang	1				
Indikasi Geografis	-				
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	-				

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	127	11.730	120%*	143	12.528	120%*

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023, realisasi indikator kinerja jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah dari tahun 2022 hingga tahun 2023 tercapai dengan sangat baik melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	126	127	143	162

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian kinerja periode tahun 2023 atas jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 162, sedangkan realisasi pada periode 2023 sebesar 12.528 dan telah melebihi target di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tentang jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah telah tercapai sangat optimal.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pemberian informasi dan penyelenggaraan layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan efisien. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual secara masiv ke berbagai daerah di kabupaten/kota. Melaksanakan kegiatan Mobile IP Clinic sebagai upaya lebih mendekatkan lagi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat karena digelar di ruang publik.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Program/kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI kepada masyarakat (termasuk sosialisasi diseminasi pengetahuan mengenai KI maupun mengenai prosedur tata cara dan/atau pendampingan dalam pengajuan permohonan pendaftaran KI) guna mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1	31	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual}}{\text{Target jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{31}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 3.00\%$$

$$\text{Konversi capaian} = 120\%^*$$

Pada periode tahun 2023, jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual pada Kantor Wilayah Banten telah dilaksanakan sebanyak 31 kegiatan. Berdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kegiatan maka capaian indikator kinerja jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual Kantor Wilayah adalah sebesar 3.100% dengan konversi capaian maksimal sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1	29	120%*	1	31	120%*

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023, realisasi indikator kinerja pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah dari tahun 2022 hingga periode 2023 telah tercapai dengan sangat baik melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1	1	1	1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian kinerja periode tahun 2023 atas Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 1 lokus, sedangkan realisasi hingga periode 2023 sebanyak 31 lokus dan telah melebihi target di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah telah tercapai sangat optimal.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pemberian informasi dan penyelenggaraan layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan efisien. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual secara masif ke berbagai daerah di kabupaten/kota. Melaksanakan kegiatan Mobile IP Clinic sebagai upaya lebih mendekatkan lagi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat karena digelar di ruang publik, Koordinasi dengan DJKI dan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha/industri, pelaku seni dan budaya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Program/kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI kepada masyarakat (termasuk sosialisasi diseminasi pengetahuan mengenai KI maupun mengenai prosedur tata cara dan/atau pendampingan dalam pengajuan permohonan pendaftaran KI) guna mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual.

2. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual}}{\text{Target Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Pada Tahun 2023, jumlah pelaksanaan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual adalah sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Memberikan konsultasi kepada pemilik merek Batik Kaserangan yang mengadukan adanya pihak yang menggunakan produknya tanpa izin. Status aduan tersebut telah diselesaikan melalui mediasi antara pihak pelapor dan terlapor. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka hasil capaian indikator kinerja telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Nihil	Nihil	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023, realisasi indikator kinerja persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2022 dinyatakan Nihil dikarenakan tidak terdapat aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Banten. Kemudian hingga periode tahun 2023 terdapat sejumlah 1 aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan status terselesaikan. Sehingga capaian atas indikator kinerja tersebut telah tercapai 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target yang ditetapkan selama periode tahun 2021 – 2024 yaitu sebesar 100%. Hasil capaian pada periode 2023 atas indikator kinerja persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual telah tercapai 100% melalui penyelesaian 1 aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah. Hal ini juga menunjukkan bahwa indikator kinerja pada 2023 telah tercapai sangat optimal.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Penyelenggaraan layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan efisien. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual secara masif ke berbagai daerah di kabupaten/kota.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Program/kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan pemahaman/diseminasi informasi KI dan edukasi kepada masyarakat.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2	4	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{6}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 300\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Hingga Tahun 2023, jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah sebanyak 6 kegiatan. Berdasarkan target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 2 lokus kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual, maka capaian indikator kinerja tersebut telah mencapai 300% dengan konversi maksimal capaian sebesar 120%*

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1	4	120%*	2	6	120%*

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023, realisasi indikator kinerja jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2022 sebanyak 4 kegiatan. Kemudian realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 6 kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa capaian hingga periode 2023 telah tercapai dengan optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1	1	2	2

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 2 lokus pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Realisasi pada periode 2023 telah melebihi target di tahun 2024 yaitu sebanyak 6 lokus kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja periode 2023 telah tercapai dengan sangat optimal.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pemberian informasi dan penyelenggaraan layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan efisien. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, promosi dan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual secara masif ke berbagai daerah di kabupaten/kota. Koordinasi dengan DJKI dan pihak pihak eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha/industri, pelaku seni dan budaya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Program/kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan pemahaman/diseminasi informasi KI dan edukasi kepada masyarakat.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2	4	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah}}{\text{Target Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{4}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 200\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Hingga Tahun 2023, pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah sebanyak 4 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Pasar Modern Kota Tangerang pada tanggal 14 Juni 2023;
- Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Mall Tangcity Kota Tangerang pada tanggal 14 Juni 2023; dan
- Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual UMKM di Kabupaten Lebak dalam acara Festival Seni Multatuli pada tanggal 16 Juni 2023.
- Pemantauan produk kekayaan intelektual UMKM di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 11 Agustus 2023

Berdasarkan target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 2 laporan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah, maka capaian indikator kinerja tersebut telah mencapai 200% dengan konversi capaian sebesar 120%*

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2	2	100%	2	4	120%*

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan. Sedangkan realisasi hingga periode 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu sebanyak 4 kegiatan. Hal ini menunjukkan capaian hingga periode 2023 telah tercapai dengan optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2	2	2	2

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 2 laporan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah. Realisasi pada periode 2023 telah melebihi target di tahun 2024 yaitu sebanyak 4 laporan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja periode 2023 telah tercapai dengan sangat optimal.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat

pengukuran kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Koordinasi dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengeket pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pihak pihak eksternal seperti pemerintah daerah, pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha/industri.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, diantaranya koordinasi dengan pihak pihak eksternal seperti pemerintah daerah, pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha/industri.

DIVISI YANKUM – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Peraturan Perundang-undangan				110,00%
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	120,00%*
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	12	100%

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase rancangan perda yang difasilitasi}}{\text{Target Persentase rancangan perda yang difasilitasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

Capaian = 125%

Konversi Capaian = 120%*

Hingga Tahun 2023, Seluruh Rancangan Peraturan Daerah telah di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Banten dengan jumlah sebanyak 161 Raperda diantaranya 48 Rancangan Peraturan Daerah dan 113 Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	Rancangan Produk Hukum di Wilayah Banten		
	Wilayah	Raperda	Raperkada
1	Provinsi Banten	6	14
2	Kabupaten Serang	3	2
3	Kota Serang	2	-
4	Kabupaten Tangerang	10	3
5	Kota Tangerang	6	64
6	Kota Tangerang Selatan	12	33
7	Kabupaten Lebak	1	-
8	Kabupaten Pendeglang	6	-
9	Kota Cilegon	2	-
	TOTAL	48	113

Berdasarkan target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 80% Rancangan Peraturan Daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah, maka capaian indikator kinerja telah mencapai 125% dengan konversi maksimal capaian sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	120%*	80%	100%	120%*

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dan realisasi indikator kinerja periode 2023 tercapai sebesar 100%. Atas capaian tersebut, maka capaian kinerja periode 2023 telah tercapai dengan optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian indikator kinerja atas persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh

kantor wilayah kemenkumham pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2024 dengan target sebesar 80%. Realisasi di tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi periode 2023 mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Melakukan pendekatan baik dengan melaksanakan Koordinasi serta komunikasi yang lebih aktif sehingga dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan yang telah dicapai oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah diantaranya:

- Melaksanakan Rapat Forum Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah;
- Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12	12	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase rancangan perda yang difasilitasi}}{\text{Target Persentase rancangan perda yang difasilitasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam peningkatan kapasitas melalui kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah dan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti oleh 12 Perancang Peraturan

Perundang-undangan di Kantor Wilayah Banten. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 12 orang. Atas realisasi tersebut, maka capaian periode tahun 2023 atas indikator kinerja jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12	12	100%	12	12	100%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023, capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sama dengan capaian indikator kinerja di tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Atas capaian tersebut, maka capaian kinerja periode 2023 telah tercapai dengan optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12	12	12	12

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2024 dengan target indikator kinerja sebesar 12 orang. Dengan Realisasi di periode 2023 sebesar 12 orang dan realisasi di tahun 2022 sebesar 12 orang.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan, melakukan pendekatan baik dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih aktif dengan Pemerintah Daerah terkait Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan yang telah dicapai oleh Sub

Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah diantaranya:

- Kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah; dan
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

DIVISI YANKUM – BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Badan Pembinaan Hukum Nasional				106,63%
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3	120,00%*
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	95,07%	115,94%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	83,45%	104,31%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	77,18	100,56%
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	40%	120%*

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	3	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah}}{\text{Target Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 150\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%^*$$

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 3 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah di Wilayah Banten diantaranya:

- Pelaksanaan rapat fasilitasi penyusunan naskah akademik
- Pelaksanaan Koordinasi permohonan data Program Legislasi Daerah (Prolegda)
- Pelaksanaan rapat penyusunan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah.

Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 atas indikator Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah sebanyak 2 kegiatan, maka capaian atas indikator tersebut mencapai 150%* dengan penerapan konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	3	120%*	2	3	120%*

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 – 2023 dengan jumlah sama yaitu sebesar 2, realisasi pada tahun 2023 dapat dipertahankan atau sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 3 kegiatan dengan capaian sebesar 120%*

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	2	2	2

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah pada tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2024 dengan target indikator kinerja sebesar 2 kegiatan. Realisasi di tahun 2023 sebesar 3 kegiatan dan realisasi di tahun 2022 sebesar 3 kegiatan.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi aktif dengan seluruh Pemerintah Daerah dan stakeholder di Wilayah Banten dalam rangka perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah diantaranya:

- Pelaksanaan rapat fasilitasi penyusunan naskah akademik
- Pelaksanaan Koordinasi permohonan data Program Legislasi Daerah (Prolegda)
- Pelaksanaan rapat penyusunan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah.

2. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Permohonan Bankum Litigasi	Pencairan Bankum Litigasi	Realisasi	Target	Capaian
A	B	C	D = C/D	E	F = D/E
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	608	578	95,07%	82%	115,94%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase realisasi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani}}{\text{Target Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{95,07\%}{82\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 75,56\%$$

Hingga tahun 2023, target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 82%. Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM di tahun 2023 adalah 608 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani (sudah dicairkan) adalah 578 permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diuraikan pada tabel diatas, maka realisasi indikator kinerja atas persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebesar 95,07% dengan capaian kinerja sebesar 115,94%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	100%	120%*	82%	95,07%	115,94%

Berdasarkan perbandingan pada tahun 2022 – 2023, realisasi capaian pada periode tahun 2023 sebesar 95,07% atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Namun jika mengacu kepada target yang ditetapkan, capaian di tahun 2023 telah tercapai melebihi target dengan capaian sebesar 115,94%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	82%	82%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 telah terlampaui pada tahun 2023 ini. Target Kinerja untuk Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di tahun 2024 adalah 82%, sementara realisasi di tahun 2023 telah mencapai 95,07%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Hasil capaian indikator kinerja di tahun 2023 yang telah tercapai optimal disebabkan telah dilakukan upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum sehingga dapat memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum
- Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (addendum).

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Permohonan Bankum Non Litigasi	Pencairan Bankum Non Litigasi	Realisasi	Target	Capaian
A	B	C	D = C/D	E	F = D/E
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	145	121	83,45%	80%	104,31%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase realisasi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani}}{\text{Target Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{83,45\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 104,31\%$$

Pada tahun 2023, target persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 80%. Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM di tahun 2023 adalah 145 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani (dicairkan) adalah 121 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka realisasi atas indikator kinerja Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebesar 83,45% dengan capaian kinerja sebesar 104,31%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	120%*	80%	83,45%	104,31%

Berdasarkan perbandingan pada tahun 2022 – 2023, target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 80% dengan realisasi pada periode tahun 2023 sebesar 83,45%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%. Namun mengacu kepada target tahun 2023, realisasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 104,31%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 telah terlampaui pada tahun 2023 ini. Target indikator kinerja untuk Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tahun 2023 dan 2024 adalah 80%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% dan realisasi di TA 2023 adalah 83,45%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Hasil capaian indikator kinerja di tahun 2023 yang telah tercapai optimal disebabkan telah dilakukan upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum sehingga dapat memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum.

- Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (addendum).

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	77,18	100,56%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks kepuasan layanan bantuan hukum}}{\text{Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{77,18}{76,75} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,56\%$$

Perhitungan realisasi kinerja berdasarkan hasil survei kepuasan penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “kuesioner Indeks kinerja OBH” pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil survey ditahun 2023, Realisasi indeks layanan bantuan hukum yaitu sebesar 77,18 indeks. Dari target yang ditetapkan sebesar 76,75 indeks maka capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 100,56%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,71	61,13	79,79%	76,75	77,18	100,56%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 77,18 lebih tinggi dibanding dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 61,13. Peningkatan hasil capaian di tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada OBH selaku pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum berkualitas.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,71	76,71	76,75	76,75

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Indeks kepuasan layanan bantuan hukum pada tahun

2023 telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023-2024 dengan realisasi indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 77,18 Indeks.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks kepuasan layanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin kepada OBH selaku pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum secara berkualitas dan sesuai peraturan Perundang-undangan. Disisi lain, berdasarkan hasil pengawasan bantuan hukum terdapat penilaian yang bersifat subjektif dari penerima bantuan hukum. Meskipun bantuan hukum yang diberikan oleh OBH telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat penilaian yang rendah dari penerima bantuan hukum.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut, diantaranya:

- Rapat evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan secara berkala tiap triwulan.
- Sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
- Kegiatan pembinaan kepada pemberi bantuan hukum.
- Pengawasan bantuan hukum oleh Panitia Pengawas Daerah kepada pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.
- Menyampaikan usulan kepada BPHN tentang pemberian *reward & punishment* terhadap Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan kinerja atas pelaksanaan bantuan hukum.
- Optimalisasi layanan bantuan hukum melalui Posko Bangkumis yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah dengan bekerjasama Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan bantuan hukum.

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk}}{\text{Target desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{70\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Hingga tahun 2023, jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan di Wilayah Banten yaitu sebanyak 75 desa/kelurahan yang saat ini sedang dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ditahun 2023 ini, terdapat 51 desa/kelurahan binaan yang telah dikukuhkan.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%	70%	70%	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 dan realisasi di tahun 2022 nilainya sama yaitu sebesar 70% dengan capaian di periode 2023 dan di Tahun 2022 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pada periode 2023 telah memenuhi target indikator kinerja di tahun 2024. Realisasi indikator kinerja di periode 2023 yaitu sebesar 70% dan realisasi indikator kinerja di tahun 2022 sebesar 70%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2022, pada tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM melakukan beberapa perbaikan guna percepatan pencapaian kinerja, yaitu dengan memasukkan indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing- masing Wilayah menjadi

salah satu Target Kinerja Kantor Wilayah sehingga memberikan daya dorong pada Kantor Wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu, dilakukan juga pembinaan oleh BPHN terhadap Kantor Wilayah sebagai pelaksana program sehingga memahami formulasi hitung pada indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah melalui kegiatan sosialisasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja kepada masing – masing Kantor Wilayah. Hasilnya pada tahun 2023 dapat tercapai realisasi sesuai dengan target capaian.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dengan menjadikan indikator ini sebagai salah satu Target Kinerja di Kantor Wilayah, telah mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah. Mengubah indikator kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM juga membawa perubahan besar dalam keberhasilan pencapaian target. Jika target pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019 didasarkan pada jumlah desa sadar hukum yang diresmikan, target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 lebih dititikberatkan pada hasil verifikasi desa/kelurahan binaan yang dianggap layak untuk diresmikan sebagai desa sadar hukum.

e. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	40%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif}}{\text{Target Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{40\%}{20\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 200\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan atas indikator kinerja Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif yaitu sebesar 20%. Formulasi perhitungan indikator kinerja tersebut berdasarkan partisipasi aktif anggota JDIHN dalam melakukan input laporan melalui sistem pada website *e-reporting*. Jumlah anggota JDIHN yang telah melakukan input laporan pada *e-reporting* yaitu sebanyak 8 anggota dari jumlah anggota JDIHN yaitu sebanyak 20 anggota. Maka, realisasi atas capaian kinerja tersebut sebesar 40%. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 20% maka capaian indikator kinerja telah tercapai sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	73,68%	120%*	20%	40%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi periode 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Namun mengacu kepada target yang ditetapkan, realisasi di tahun 2023 telah tercapai dengan optimal dengan realisasi sebesar 40% dan capaian indikator kinerja sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	20%	20%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif pada periode 2023 telah melebihi target di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi indikator kinerja di tahun 2023 yaitu sebesar 40%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Sebanyak 8 anggota JDIHN yang telah melakukan e-reporting dari total 20 anggota JDIHN yaitu Universitas Pamulang, Sekretariat Daerah Kota Cilegon, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kabupaten Serang, DPRD Kabupaten Pandeglang, DPRD Kota Cilegon, DPRD Kota Tangerang, dan DPRD Kota Tangerang Selatan. Kemudian pada tahun 2023, telah dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama (PKS) perihal rencana pengintegrasian di 6 universitas yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan, Universitas Mathla'ul Anwar, Universitas Muhammadiyah Tangerang, UIN Sultan Maulanan Hasanudin, dan Universitas Tangerang Raya

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Percepatan pelaksanaan penataan dokumen hukum pada laman jdihn.go.id

- Koordinasi dalam rangka mendorong pengintegrasian JDIHN dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Stakeholder
- Koordinasi dan komunikasi aktif dengan seluruh anggota JDIHN untuk menyampaikan input laporan pada e-reporting tepat waktu.

DIVISI YANKUM – HAK ASASI MANUSIA

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Hak Asasi Manusia				120,00%*
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	9	120,00%*
	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	8	120,00%*
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	18	120,00%*
Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	10	120,00%*

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2	9	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM}}{\text{Target Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{9}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 450\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Pada tahun 2023, berdasarkan pelaporan Aksi HAM Periode B.04 terdapat 9 (sembilan) Instansi Pemerintah di Wilayah Banten yang telah melaksanakan program Aksi HAM terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi dan 8 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan target indikator kinerja sebesar 2 instansi pemerintah, maka capaian atas indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM tercapai sebesar 450% dengan konversi capaian maksimal sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2	9	120%*	2	9	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi tahun 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sejumlah 9 pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja pada tahun 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2	2	2	2

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada tahun 2023 telah tercapai melampaui target di tahun 2024 yaitu target sebesar 2 instansi pemerintah. Realisasi indikator kinerja di tahun 2023 yaitu sebesar 9 Instansi Pemerintah dan realisasi indikator kinerja di tahun 2022 sebesar 9 Instansi Pemerintah.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Melakukan pendekatan baik dengan melaksanakan Koordinasi serta komunikasi

yang lebih aktif sehingga dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pelaporan Aksi HAM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM diantaranya:

- Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun Anggaran 2023
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Aksi HAM Tahun 2023 untuk mendorong Pemerintah daerah melakukan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan Format dan data dukung yang diminta.
- Penyelenggaraan Rapat Kerja Aksi HAM Tahun 2023 oleh Kanwil Kemenkumham Banten dengan Peserta dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kab/Kota Peduli HAM

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1	8	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kab/Kota Peduli HAM}}{\text{Target Jumlah Kab/Kota Peduli HAM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{8}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 800\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Pada tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM Pada Tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh Kab/Kota yaitu sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1 instansi pemerintah, maka capaian indikator kinerja telah mencapai 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1	5	120%*	1	8	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 8 instansi pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu 5 instansi

pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di tahun 2023 telah tercapai dengan sangat optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1	1	1	1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja Jumlah Kab/Kota Peduli HAM pada tahun 2023 telah melebihi target di tahun 2023 dan tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 8 instansi pemerintah.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Kab/Kota Peduli HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Salah satu faktor penyebab keberhasilan adalah dengan melakukan pendekatan melalui koordinasi dan komunikasi yang lebih aktif sehingga dapat memberikan motivasi dan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pemenuhan Indikator Penilaian Kab/kota Peduli HAM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Rapat Persiapan Penginputan Laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi KKP HAM Tahun 2023.
- Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	18	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{instansi pemerintah menindaklanjuti diseminasi \& penguatan HAM}}{\text{Target instansi pemerintah yang menindaklanjuti diseminasi \& penguatan HAM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{18}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 1800\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%^*$$

Pada tahun 2023, Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM sebanyak 18 Instansi pemerintah yaitu 18 Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Banten. Dari target yang ditetapkan sebesar 1 instansi pemerintah maka capaian indikator kinerja tersebut mencapai sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2	3	120%*	1	18	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi ditahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja di tahun 2023 telah tercapai sangat optimal dengan capaian indikator kinerja sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	2	1	1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja Jumlah Kab/Kota Peduli HAM pada tahun 2023 telah melebihi target di tahun 2023 dan tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 18 instansi pemerintah.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Salah satu faktor penyebab keberhasilan yaitu dengan melakukan Koordinasi dan

Diseminasi terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada Pemerintah/Instansi yang terkait. Hal ini berdampak positif dimana terdapat 6 Satuan Kerja yang mendapatkan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM di tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah Banten, LP Kls I Tangerang, LP Pemuda Kls IIA Tangerang, LP Kls III Rangkasbitung, Rutan Kls IIB Pandegang dan Kanim Kls I Non TPI Tangerang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada Satuan Kerja
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis HAM.
- Pelaksanaan kegiatan Asistensi Pemenuhan Data Dukung Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	10	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia}}{\text{Target Jumlah Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{10}{3} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 333,3\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Pada tahun 2023, terdapat 13 pengaduan dugaan pelanggaran HAM yaitu 6 pengaduan secara langsung dan 7 pengaduan tidak langsung. Dari jumlah 13 Pengaduan tersebut, sebanyak 10 pengaduan telah selesai dibuat rekomendasi. Dari target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 3 rekomendasi, maka capaian atas indikator kinerja tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah hingga periode 2023 mencapai 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rekomendasi	3	6	120%*	3	10	120%*

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah						

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi pada periode 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Dengan realisasi di tahun 2023 sebanyak 10 rekomendasi dan realisasi di tahun 2022 sebanyak 6 rekomendasi.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	3	3

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah pada periode 2023 telah melebihi target di tahun 2023 dan tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 10 rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah yang memenuhi target apabila kedua belah pihak menemukan kesepakatan serta pada saat kantor wilayah memberikan rekomendasi kepada instansi terkait, instansi tersebut menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan rapat Telaah untuk mengetahui Dugaan Pelanggaran HAM yang diadakan
- Pelaksanaan Koordinasi untuk melakukan klarifikasi Dugaan Pelanggaran HAM
- Pelaksanaan rapat Audiensi Yankomas yang mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan.

DIVISI YANKUM – BALITBANG HUKUM DAN HAM

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Balitbang Hukum dan HAM				110,00%
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	120%
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1	100%

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah}}{\text{Target Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%$$

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 3 analisis kebijakan dengan pemanfaatan aplikasi SIPKIMHAM dengan tema sebagai berikut:

- Urgensi Dispensasi Nikah menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif HAM
- Kekerasan pada Anak di Provinsi Banten
- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah.

Seluruh hasil analisis kebijakan tersebut telah disampaikan sebagai bahan

penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia telah tercapai 100%. Mengacu kepada target indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian indikator kinerja tersebut sebesar 125% dengan konversi capaian maksimal 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	120%*	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi pada tahun 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Berdasarkan target yang ditetapkan, capaian di tahun 2022 dan capaian di periode 2023 telah tercapai optimal yaitu mencapai 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi pada periode tahun 2023 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja atas persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan penyampaian hasil pelaksanaan Analisis kebijakan dengan

tema kajian sebagai berikut:

- Urgensi Dispensasi Nikah menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif HAM.
- Kekerasan pada Anak di Provinsi Banten.
- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan data kajian analisis kebijakan Hukum dan HAM
- Pengambilan dan pengumpulan data analisis kebijakan Hukum dan HAM
- Penyusunan hasil kajian analisis kebijakan Hukum dan HAM
- Pelaksanaan *forum group discussion* (FGD) dan rapat presentasi membahas hasil analisis kebijakan Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	1	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan}}{\text{Target Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Pada tahun 2023, telah disosialisasikan hasil penelitian Hukum dan HAM melalui Diskusi Daring (Opini Kebijakan). Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan judul "Nilai Kemanfaatan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan". Mengacu kepada target indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 1 buku/judul, maka capaian indikator kinerja hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah telah tercapai sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan	1	1	100%	1	1	100%

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah						

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi pada tahun 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu 1 buku/judul hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah. Berdasarkan target yang ditetapkan, maka capaian di tahun 2022 dan capaian di periode 2023 telah tercapai optimal yaitu mencapai 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	1	1	1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024. Dengan realisasi pada periode tahun 2023 sebesar 1 buku/judul.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah didukung atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil analisis kebijakan Hukum dan HAM melalui diskusi daring (opini kebijakan) di tahun 2023, dimana waktu pelaksanaan telah ditentukan langsung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM secara serentak pada 33 kantor wilayah se-Indonesia.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah yaitu kegiatan sosialisasi hasil analisis kebijakan Hukum dan HAM dengan judul "Nilai Kemanfaatan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan" yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2023.

DIVISI KEIMIGRASIAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Keimigrasian				119,74%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,95	120,00%*
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,74	119,49%

Keterangan : * Konversi 120 (Persentase capaian tertinggi dibatasi maksimal 120%)

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Satuan Kerja	Jumlah Responden	Hasil Survei IKM	Realisasi	Target	Capaian
A	B	C	D	E	F = $\frac{D}{E}$
Kanim Tangerang	673	3,93	3,95	3,25	120%*
Kanim Serang	333	3,99			
Kanim Cilegon	399	3,96			
Rata-rata Nilai IKM		3,95			

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,95}{3,25} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 121,54\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Keimigrasian pada 3 Kantor Imigrasi di Wilayah Banten diperoleh nilai rata-rata IKM dalam Skala 4 (sesuai skala target indikator) sebesar 3,95 indeks. Target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 3,25 indeks, dengan realisasi sebesar 3,95 indeks maka hasil capaian atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah tercapai sebesar 121,54% dengan penerapan konversi capaian menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,96	120%*	3,25	3,95	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi pada tahun 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 3,95 indeks dan realisasi di tahun 2022 sebesar 3,96 indeks. Namun, mengacu kepada target yang ditetapkan maka capaian di tahun 2023 dan capaian di tahun 2022 telah tercapai dengan optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,25	3,30

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,95 indeks sedangkan realisasi di tahun 2022 sebesar 3,96 indeks.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung atas pelaksanaan kemudahan Pelayanan Keimigrasian di Wilayah seperti layanan paspor online melalui M-Paspor, dan Kerjasama Layanan Keimigrasian dengan Instansi Pemerintah dan stakeholder terkait diantaranya:

- Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Pandeglang
- Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
- Unit Layanan Paspor di Mall WTC Serpong
- Pelayanan Paspor di Gerai Tangcity Mall Kota Tangerang
- Program Immigration Corner di Universitas Pelita Harapan

- Program Immigration Corner di Universitas Bina Nusantara
 - Mall Pelayanan Publik di Kota Cilegon
 - Mall Pelayanan Publik di Kab.Lebak
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diantaranya:
- Sosialisasi dan uji coba Paspur Online kepada masyarakat dan stakeholder
 - Pelaksanaan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah, akademisi, dan stakeholder untuk menyediakan layanan Keimigrasian
 - Pelaksanaan pembinaan teknis Keimigrasian dalam rangka pengawasan dan pengendalian teknis Keimigrasian di Wilayah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,74	119,49%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,74}{3,13} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 119,49\%$$

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan atas indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah yaitu sebesar 3,13 indeks. Formulasi perhitungan indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil survey indeks pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan hasil survey tersebut diketahui nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Banten sebesar 3,74 indeks. Maka hasil capaian indikator kinerja atas Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah tercapai sebesar 119,49%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,82	120%*	3,13	3,74	119,49%

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Namun mengacu kepada target yang telah ditetapkan, hasil capaian indikator kinerja di tahun 2023 telah tercapai optimal dengan capaian sebesar 119,49%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2023 telah melebihi target di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 3,74 indeks.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah didukung atas pelaksanaan kegiatan INTELDAKIM dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 763 kegiatan diantaranya:

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pengawasan	534
2	Intelijen	53
3	TAK	154
4	TIMPORA	11
5	Operasi Gabungan	11
	TOTAL	763

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan Pengawasan, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian di Wilayah
- Pelaksanaan pendataan pengungsi luar negeri dan penjamin orang asing
- Pengembangan aplikasi pengawasan orang asing (APOA-Jawara) guna memantau keberadaan orang asing yang tinggal di Hotel atau penginapan di Wilayah Banten
- Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi dan partisipasi tentang APOA-Jawara kepada Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan stakeholder terkait di Wilayah
- Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum setempat dalam pengawasan WNA di Wilayah
- Pelaksanaan pembinaan teknis Keimigrasian dalam rangka pengawasan dan pengendalian teknis Keimigrasian di Wilayah.

DIVISI PEMASYARAKATAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Pemasyarakatan				112,44%
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82	99,36	120,00%*
Meningkatnya pelayanan tahanan di Wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	111,11%
	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	100%	111,11%
	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	92,52%	102,80%
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	93,83%	120,00%*
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	98,85%	116,29%
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	73,04%	85,93%
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	23,08%	120,00%*
	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	120,00%*
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	76,96%	106,89%
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30	114	120,00%*
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	99,01%	120,00%*
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan	80%	111,11%	120,00%*

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap			
Meningkatnya pelayanan pembinaan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60,11%	100,18%
	Persentase anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	32,97%	120,00%*
	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	83,41%	120,00%*
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	120,00%*
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11%
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100%	111,11%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	120,00%*
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	82,05%	100,07%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100,00%	120,00%*
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,65%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	120,00%*
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85,06%	100,07%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100,00%	120,00%*
Meningkatnya Pelayanan Perawatan	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/	80%	100%	120,00%*

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Anak, sesuai dengan standar			
	Persentase Tahanan/Narapidana /Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu Hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%
	Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	120,00%*
	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100,00%	117,65%
	Persentase Tahanan/Narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Posistif (berhasil sembuh)	80%	66,12%	82,65%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	120,00%*

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82	99,36	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah}}{\text{Target Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99,36}{82} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 121,17\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Target yang ditetapkan atas indikator kinerja Indeks penyelenggaraan

pemasyarakatan di wilayah di tahun 2023 yaitu sebesar 82 indeks. Formulasi perhitungan realisasi dihitung berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Pemasyarakatan pada 16 Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 pada 16 Satuan Kerja Pemasyarakatan diperoleh nilai rata-rata IKM dalam Skala 100 (sesuai skala target indikator kinerja) sebesar 99,36 dengan jumlah rata-rata responden sebanyak 587 responden. Atas realisasi tersebut, maka capaian indikator kinerja pada periode 2023 telah tercapai sebesar 121,17% dengan penerapan konversi capaian menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	81	Tidak menjadi target indikator kinerja Kanwil	-	82	99,36	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, pada tahun 2022 indikator kinerja atas Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja Kantor Wilayah dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menjadi indikator kinerja dengan target sebesar 82 indeks. Realisasi di tahun 2023 sebesar 99,36 indeks dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	80	81	82	83

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah pada tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 99,36 indeks.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 atas layanan Pemasyarakatan pada 16 Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan

Kantor Wilayah Banten diperoleh nilai rata-rata IKM dalam Skala 100 (sesuai skala target indikator kinerja) sebesar 98,525 indeks dengan jumlah responden sebanyak 587 responden. Realisasi atas hasil survey tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemasyarakatan telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja diantaranya:

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	111,11%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase menurunnya tahanan yang overstaying}}{\text{Target Persentase menurunnya tahanan yang overstaying}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\%$$

Realisasi capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan persentase penurunan tahanan overstaying selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Data Overstaying	Jumlah
A	Tahanan overstay per 1 Januari 2023	0
B	Akumulasi tahanan overstay Januari s.d Desember 2023	91
C	Tahanan overstay per 31 Desember 2023	0
D	Jumlah penurunan overstay sd. Des 2023 ($D = B - C$)	91
E	Realisasi persentase penurunan overstay sd. Juni 2023 ($E = \frac{D}{B}$)	100%

Berdasarkan target yang ditetapkan di tahun 2023 atas indikator kinerja Persentase menurunnya tahanan yang overstaying yaitu sebesar 90%. Maka capaian pada tahun 2023 atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 111,11%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	98,08%	120%*	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 100% meningkat dibanding dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 98,08%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target yang ditetapkan di tahun 2024 dengan realisasi di periode tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase menurunnya tahanan yang overstaying hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Melakukan konsolidasi dan pertukaran data tahanan secara rutin dengan Aparat Penegak Hukum terkait dalam upaya penanganan overstaying tahanan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah diantaranya:

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Pelaksanaan sosialisasi penanganan overstaying tahanan
- Pelaksanaan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111,11%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum}}{\text{Target Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\%$$

Realisasi capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah tahanan yang mendapat layanan penyuluhan hukum dibagi dengan jumlah tahanan yang diajukan/diusulkan mengikuti penyuluhan hukum. Pada tahun 2023, jumlah tahanan mendapat layanan penyuluhan hukum sebanyak 1.472 tahanan dari jumlah tahanan yang diusulkan mengikuti penyuluhan hukum sebanyak 1.472 tahanan. Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka capaian kinerja atas indikator kinerja mencapai 111,11%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	88,31%	110,39%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 100% meningkat dibanding dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 88,31%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum pada tahun 2023 masih mencapai target di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui:

- Pelaksanaan kerjasama bantuan hukum oleh OBH/LBH yang telah terakreditasi
- Peran petugas dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang

bantuan hukum kepada tahanan

- Peran aktif Kantor Wilayah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bantuan hukum oleh OBH khususnya kepada tahanan di UPT Masyarakat
- Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas tentang penyuluhan hukum secara mandiri oleh petugas.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum diantaranya:

- Sosialisasi kepada tahanan selaku penerima bantuan hukum tentang pelaksanaan program bantuan hukum gratis
- Pembinaan kepada pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi di Kantor Wilayah atas pelaksanaan bantuan hukum
- Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum oleh Panitia Pengawas Daerah kepada pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum
- Bimbingan Teknis kepada petugas tentang pelaksanaan penyuluhan hukum secara mandiri oleh petugas.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	92,52%	102,80%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum}}{\text{Target Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,52\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 102,80\%$$

Realisasi capaian indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dihitung berdasarkan jumlah tahanan yang mendapat pendampingan bantuan hukum litigasi dibagi dengan jumlah keseluruhan tahanan yang diusulkan mendapat pendampingan bantuan hukum litigasi. Pada tahun 2023, jumlah tahanan mendapatkan bantuan hukum litigasi sebanyak 507 tahanan dari jumlah usulan sebanyak 548 tahanan. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja yaitu sebesar 92,52%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka capaian kinerja atas indikator kinerja mencapai 102,80%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	88,31%	110,39%	90%	92,52%	102,80%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 92,52% mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 88,31%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023 namun masih belum mencapai target di tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui:

- Pelaksanaan kerjasama bantuan hukum oleh OBH/LBH yang telah terakreditasi
- Peran petugas dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang bantuan hukum kepada tahanan
- Peran aktif Kantor Wilayah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bantuan hukum oleh OBH khususnya kepada tahanan di UPT Masyarakat
- Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas tentang penyuluhan hukum secara mandiri oleh petugas.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja diantaranya:

- Sosialisasi kepada tahanan selaku penerima bantuan hukum tentang pelaksanaan program bantuan hukum gratis
- Pembinaan kepada pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi di Kantor

Wilayah atas pelaksanaan bantuan hukum

- Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum oleh Panitia Pengawas Daerah kepada pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum
- Bimbingan Teknis kepada petugas tentang pelaksanaan penyuluhan hukum secara mandiri oleh petugas.

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	93,83%	120%*

Capaian =

$$\frac{\text{Realisasi Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan}}{\text{Target Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93,83\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 134,04\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dihitung berdasarkan hasil penilaian SPPN terhadap WBP yang mendapat nilai baik dan sangat baik dibagi dengan jumlah seluruh WBP yang dilakukan penilaian SPPN. Berdasarkan hasil penilaian di tahun 2023, WBP yang mendapat nilai baik dan sangat baik sejumlah 5.311 WBP dari keseluruhan WBP yang dinilai sejumlah 5.660 WBP. Berdasarkan data tersebut, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 93,83%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 70%, maka capaian kinerja atas indikator kinerja mencapai 134,04% dengan konversi capaian maksimal sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan	65%	78,15%	120%*	70%	93,83%	120%*

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian						

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 93,83% mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 78,15%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2023 telah tercapai melampaui target di tahun 2024. Realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 93,88% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 78,15%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian didukung melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana dan evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana yang dilakukan rutin setiap bulan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui program kesadaran hukum berbangsa dan bernegara, program kemampuan intelektual, program pembinaan kesadaran beragama, dan program kesehatan jasmani.
- Evaluasi rutin atas pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\text{Target Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{99\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 101,01\%$$

Formulasi perhitungan realisasi capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dihitung berdasarkan jumlah usulan remisi yang disetujui dibagi dengan jumlah keseluruhan usulan remisi. Berdasarkan data usulan remisi tahun 2023, keseluruhan usulan remisi telah disetujui dengan jumlah sebanyak 13.679 remisi diantaranya :

- Remisi Imlek : 3 orang
- Remisi Nyepi : 10 orang
- Remisi Idul Fitri : 6.173 orang
- Remisi Waisak : 164 orang
- Remisi Anak Nasional : 37 orang
- Remisi Umum (17 Agustus) : 6.972 orang
- Remisi Natal : 320 orang
- TOTAL : 13.679 orang

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja di tahun 2023 mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 99%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut mencapai 101,01%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102,04%	99%	100%	101,01%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 telah tercapai optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi didukung melalui pemutakhiran sistem SDP dalam pelaksanaan remisi narapidana.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	98,85%	116,29%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi}}{\text{Target Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{98,85\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 116,29\%$$

Formulasi perhitungan realisasi capaian indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi dihitung berdasarkan jumlah WBP yang

mendapat hak integrasi dibagi dengan jumlah keseluruhan usulan integrasi. Berdasarkan data integrasi tahun 2023, sebanyak 3.693 WBP telah mendapat Hak Integrasi dari total usulan integrasi sebanyak 3.736 usulan. Perhitungan realisasi indikator kinerja tersebut diketahui sebesar 98,85%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut mencapai 116,29%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	80%	95,51%	119,39%	85%	98,85%	116,29%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 98,85% mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 95,51%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi pada tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 98,85%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi usulan integrasi melalui akses Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan kelengkapan persyaratan administrative usulan integrasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	73,04%	85,93%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\text{Target Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{73,04\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 85,93\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan dihitung berdasarkan jumlah WBP yang mendapatkan pendidikan formal dibagi dengan jumlah WBP yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Pada tahun 2023, sebanyak 382 WBP mendapatkan hak pendidikan yang terdiri dari 268 pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (Paket A, B, C) dan 114 pendidikan tinggi. Sedangkan jumlah WBP yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal sebanyak 523 WBP dengan rincian sebagai berikut:

No	UPT	Wajib Belajar 9 Tahun	Pendidikan Tinggi	Jumlah	WBP Tidak Memiliki Pendidikan Formal	Realisasi
1	LP Kls I Tangerang*	35	55	90	50	180%
2	LP Pemuda Tangerang*	110	59	169	129	131,01%
3	LP Kls III Rangkasbitung*	123	-	123	32	384,38%
4	LPKA Tangerang*	-	-	-	11	-
5	LP Kls IIA Tangerang	-	-	-	8	-
6	LP Kls IIA Serang	-	-	-	81	-
7	LP Kls IIA Cilegon	-	-	-	122	-
8	LP Perempuan Tangerang	-	-	-	5	-
9	LP Terbuka Ciangir	-	-	-	2	-
10	Rutan Tangerang	-	-	-	68	-
11	Rutan Pandeglang	-	-	-	9	-
12	Rutan Serang	-	-	-	6	-
Jumlah		268	114	382	523	73,04%

Keterangan : *UPT yang menyelenggarakan pendidikan formal

Berdasarkan data tersebut, realisasi atas indikator kinerja yaitu sebesar 73,04%. Mengacu kepada target yang telah ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka capaian atas indikator kinerja mencapai 85,93%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	80%	80%	100%	85%	73,04%	85,93%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 73,04% mengalami penurunan dibanding dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 80%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan pada tahun 2023 masih belum mencapai target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 73,04% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 80%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Terdapat beberapa kendala yang terjadi atas pemenuhan target indikator kinerja pada periode 2023 diantaranya:

- Belum seluruh Lapas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal bagi WBP. Saat ini terdapat 4 Lapas di Wilayah Banten yang telah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal yaitu LP Kls I Tangerang, LP Pemuda Tangerang, LP Kls III Rangkasbitung, dan LPKA Tangerang.
- Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pendidikan WBP di Lapas.
- Kurangnya minat WBP mengikuti kegiatan Kejar Paket A, B dan C
- Singkatnya Pidana yang dijalani oleh WBP
- Umur WBP yang tidak muda lagi yang membuat mereka lebih memilih mengikuti kegiatan kemandirian dibandingkan dengan Pendidikan Formal

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan PKBM dan program kejar paket A,B,dan C
- Kerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi terkait izin dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan formal
- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasayarakatan

- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

e. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	17%	23,08%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya}}{\text{Target Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{23,08\%}{17\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 135,76\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin dihitung berdasarkan hasil penilaian SPPN terhadap narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sangat patuh dibagi dengan jumlah keseluruhan narapidana risiko tinggi. Pada tahun 2023, hasil penilaian SPPN terhadap narapidana risiko tinggi terdapat pada LP Kls I Tangerang, LP Serang, LP Cilegon dan LP Perempuan Tangerang. Jumlah narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sangat patuh yaitu sebanyak 3 narapidana dari jumlah keseluruhan narapidana risiko tinggi sebanyak 13 narapidana. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi atas indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 23,08%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 17%, maka capaian atas indikator kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin telah tercapai sebesar 135,76% dengan penerapan konversi capaian maksimal sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	99,49%	120%*	17%	23,08%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 23,08% mengalami penurunan dibanding

dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 99,49%. Namun mengacu kepada target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 17%, maka hasil capaian di tahun 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	15%	17%	19%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 19%. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 23,08% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 99,49%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin didukung melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana dan pelaksanaan pembinaan kepribadian, serta evaluasi penilaian pembinaan narapidana setiap bulan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan pembinaan kepribadian nadapidana melalui program kesadaran hukum berbangsa dan bernegara, program kemampuan intelektual, program pembinaan kesadaran beragama, dan program kesehatan jasmani.
- Evaluasi rutin atas pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana.

f. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan}}{\text{Target Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{31\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 322,58\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%^*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dihitung berdasarkan Jumlah WBP yang mengikuti pelatihan bersertifikasi dibagi dengan target jumlah WBP yang akan menjalani pelatihan bersertifikasi. Pada tahun 2023, jumlah WBP yang telah mengikuti pelatihan bersertifikasi yaitu sejumlah 320 WBP dari jumlah WBP yang akan menjalani pelatihan bersertifikasi sebanyak 320 WBP. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi atas indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 31%, maka capaian atas indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi telah tercapai sebesar 322,58% dengan penerapan konversi capaian maksimal sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	87,05%	120%*	31%	100%	120%*

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 100% mengalami peningkatan dibandingkan realisasi di tahun 2022 sebesar 87,05%. Hal ini menunjukkan hasil capaian indikator kinerja tahun 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%	34%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu target sebesar 34%. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 87,05%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat

kegiatan pengukuran Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi didukung melalui pelaksanaan pelatihan ketrampilan bersertifikat dibidang agribisnis, manufaktur, dan jasa.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan sosialisasi program pelatihan bersertifikat kepada WBP
- Pelatihan ketrampilan bersertifikat di bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa
- Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan
- Pemasaran hasil ketrampilan produktivitas WBP.

g. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72%	76,96%	106,89%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif}}{\text{Target Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{76,96\%}{72\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106,89\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif dihitung berdasarkan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi dengan jumlah narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{3}$ masa pidana. Pada tahun 2023, jumlah narapidana yang bekerja dan produktif pada Lapas/Rutan sebanyak 3.855 dari jumlah narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{3}$ masa pidana yaitu sebanyak 5.009 narapidana. Maka realisasi atas indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 76,96%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 72%, maka capaian atas indikator kinerja sebesar 106,89%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	67%	67%	100%	72%	76,96%	106,89%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 76,96% mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 67%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	67%	72%	77%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2023 namun belum melampaui target di tahun 2024 yaitu sebesar 77%. Realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 76,96% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 67%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Kendala dihadapi dalam mencapai indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif yaitu belum terpenuhinya syarat administratif dan substantif agar narapidana dapat bekerja dan produktif.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Peningkatan kualitas pembinaan narapidana
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian
- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

h. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Narapidana Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30	114	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi}}{\text{Target Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{114}{30} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 380\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi dihitung berdasarkan jumlah WBP yang mengikuti pendidikan tinggi pada LP Kls I Tangerang & Kampus Kehidupan di LP Pemuda Tangerang dibagi dengan target jumlah WBP yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2023. Pada tahun 2023, jumlah WBP yang mengikuti pendidikan tinggi sebanyak 114 WBP. Target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 30 WBP maka realisasi atas indikator kinerja tersebut sebesar 380% dengan konversi capaian maksimal sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30	128	120%*	30	114	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan realisasi di tahun 2022. Dengan jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi di tahun 2023 sebanyak 114 narapidana, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 128 narapidana. Namun, mengacu kepada target yang telah ditetapkan di tahun 2023 sebesar 30 narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi, maka realisasi periode 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30	30	30	30

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 114 narapidana dan realisasi di tahun 2022 sebesar 128 narapidana.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan pendidikan tinggi pada LP Kls I Tangerang dan Kampus Kehidupan di LP Kls IIA Pemuda Tangerang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi diantaranya:

- Pelaksanaan program pendidikan tinggi pada Kampus Kehidupan di LP Kls IIA Pemuda Tangerang;
- Kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi WBP;
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian;

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	80%	99,01%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga}}{\text{Target Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99,01\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 123,76\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dihitung berdasarkan jumlah basan baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya (tidak terdepresiasi) dibagi dengan jumlah keseluruhan basan baran. Pada tahun 2023, terdapat 400 basan baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dari jumlah keseluruhan sebanyak 404 basan baran. Maka realisasi atas indikator kinerja tersebut diketahui sebesar 99,01%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja telah tercapai sebesar 123,76% dengan penerapan konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%	100%	120%*	80%	99,01%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Namun mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian indikator kinerja di tahun 2023 telah tercapai optimal dengan realisasi sebesar 99,01%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja atas Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,01% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja atas Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung atas pelaksanaan perawatan dan pengamanan terhadap basan baran

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Kegiatan perawatan dan pengamanan terhadap basan baran secara rutin;
- Pelaksanaan sosialisasi tugas dan fungsi Rupbasan kepada APH yang terkait
- Inventarisir dan pemetaan basan baran berdasarkan nilai basan baran
- Pelaksanaan BINTORWASDAL atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang	80%	111,11%	120%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Berkuatan Hukum Tetap			

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Basan Baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan}}{\text{Target Persentase Basan Baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{111,11\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 138,89\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dihitung berdasarkan jumlah register basan baran yang telah dieksekusi dibagi dengan jumlah basan baran yang telah *incracht*. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 10 register basan baran yang telah dieksekusi yaitu 6 *incracht* eksekusi, dan 4 mutasi eksekusi. Sedangkan jumlah basan baran yang telah *incracht* sebanyak 9 register maka realisasi indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 111,11%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian indikator kinerja tercapai sebesar 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	60%	100%	120%*	80%	111,11%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi di tahun 2022. Dengan realisasi tahun 2023 sebesar 111,11% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	60%	80%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah melebihi target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 111,11% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan atas capaian indikator kinerja didukung atas peran aktif petugas dalam koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait serta pelaksanaan perawatan dan pengamanan terhadap basan baran.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Kegiatan perawatan dan pengamanan terhadap basan baran secara rutin;
- Pelaksanaan sosialisasi tugas dan fungsi Rupbasan kepada APH yang terkait
- Inventarisir dan pemetaan basan baran berdasarkan nilai basan baran
- Pelaksanaan BINTORWASDAL atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan.

5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60,11%	100,18%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan}}{\text{Target Persentase klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{60,11\%}{60\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,18\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dihitung berdasarkan jumlah klien yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga dibagi dengan jumlah seluruh klien usia produktif. Ditahun 2023, Jumlah klien yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan sebanyak 2.526 klien dari total keseluruhan klien produktif sebanyak 4.202 klien. Dari data tersebut diketahui realisasi indikator kinerja sebesar 60,11%. Mengacu pada target tahun 2023 yaitu sebesar 60%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 100,18%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	51,77%	103,54%	60%	60,11%	100,18%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 60,11% mengalami peningkatan dibandingkan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 51,77%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	50%	60%	70%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2023 namun masih belum mencapai target di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 60,11% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 51,77%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja seperti terbatasnya anggaran untuk bimbingan kemandirian, ketrampilan dan kepribadian klien, dan lokasi tempat tinggal klien yang jauh dari tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan sehingga kurang minat klien untuk datang dalam kegiatan bimbingan kemandirian/ketrampilan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian, Ketrampilan, dan Kepribadian;
- Kerjasama dengan dinas sosial dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan bagi klien.
- Meningkatkan kerjasama dengan Pokmas Lipas di seluruh wilayah kerja Bapas

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	32,97%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara}}{\text{Realisasi Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{55\%}{32,97\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 166,82\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Pengukuran atas capaian indikator kinerja diukur berdasarkan semakin rendah jumlah anak atau persentase anak yang mendapat putusan pidana penjara maka semakin tinggi hasil capaiannya. Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan jumlah anak yang mendapat putusan pidana penjara dibagi dengan jumlah keseluruhan anak yang dilakukan pendampingan ABH oleh Bapas. Pada tahun 2023, terdapat 151 anak yang mendapat putusan pidana penjara dari total keseluruhan anak yang dilakukan pendampingan sejumlah 458 anak. Maka perhitungan atas realisasi indikator kinerja diketahui sebesar 32,97%. Mengacu target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 55% anak yang mendapatkan putusan pidana penjara, maka capaian indikator kinerja telah tercapai sebesar 166,82% dengan penerapan konversi capaian menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	60%	41,49%	120%*	55%	32,97%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 32,97% anak yang mendapatkan putusan pidana penjara. Realisasi tersebut lebih baik dibanding tahun 2022 dengan realisasi sebesar 41,49% anak yang mendapatkan putusan pidana penjara. Di periode 2023 anak yang mendapat putusan pidana penjara lebih sedikit dibandingkan di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan anak telah dilaksanakan secara optimal sehingga semakin rendah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	65%	60%	55%	50%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada periode 2023 yaitu sebesar 32,97% telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Semakin rendah persentase realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara, maka semakin baik hasil capaian indikator kinerja tersebut.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung atas penerapan program keadilan *restoratif*, dan optimalnya pelaksanaan pendampingan ABH di Bapas.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi aktif dengan APH di Wilayah;
- Optimalisasi pelaksanaan pendampingan ABH di Bapas;
- Pelaksanaan kegiatan DILKUMJAKPOL membahas implementasi penerapan Keadilan *justice*.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	83,41%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya}}{\text{Target Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{83,41\%}{35\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 238,31\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya dihitung berdasarkan jumlah klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya dibagi dengan jumlah keseluruhan klien anak. Pada tahun 2023, terdapat 191 klien anak yang telah terpenuhi pendidikannya dari total keseluruhan klien anak sejumlah 229 klien. Perhitungan atas realisasi indikator kinerja tersebut diketahui sebesar 83,41%. Mengacu target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 35%, maka capaian indikator kinerja tersebut telah tercapai sebesar 238,31% dengan penerapan konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	30%	76,09%	120%*	35%	83,41%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 83,41% meningkat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 76,09%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 capaian indikator kinerja tersebut telah tercapai optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	30%	35%	40%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 83,41% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 76,09%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung atas pelaksanaan kegiatan wajib belajar seperti kejar Paket A, B, dan C bagi klien Anak.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan klien anak;
- Pelaksanaan wajib belajar melalui Kejar Paket A, B, dan C;

6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Anak Mengikuti Pendidikan Keterampilan Bersertifikat}}{\text{Target Persentase Anak Mengikuti Pendidikan Keterampilan Bersertifikat}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat dihitung berdasarkan jumlah Andik yang mengikuti pendidikan ketrampilan dan bersertifikat dibagi dengan target Andik yang diusulkan mengikuti pendidikan ketrampilan dan bersertifikat. Pada tahun 2023, terdapat 40 Andik yang telah mengikuti kegiatan ketrampilan dan bersertifikat dari jumlah usulan sebanyak 40 Andik. Perhitungan realisasi indikator kinerja tersebut diketahui sebesar 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 125% dengan penerapan konversi capaian menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	75%	86,02%	114,69%	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 100% meningkat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 86,02%. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja di tahun 2023 telah tercapai optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	75%	80%	85%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 86,02%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui pelaksanaan pelatihan ketrampilan bersertifikat dibidang agribisnis, manufaktur, dan jasa.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan sosialisasi program pelatihan bersertifikat
- Pelatihan ketrampilan bersertifikat di bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa
- Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi}}{\text{Target Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi dihitung berdasarkan jumlah Andik yang memperoleh hak integrasi dibagi dengan jumlah keseluruhan usulan integrasi. Di tahun 2023, terdapat 54 Andik yang telah mendapatkan hak integrasi dari jumlah keseluruhan usulan integrasi sebanyak 54 usulan. Perhitungan realisasi indikator kinerja tersebut diketahui sebesar 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023

yaitu sebesar 100%, maka capaian atas indikator kinerja tercapai sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah mencapai target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase anak yang memperoleh hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaan indikator kinerja yaitu terdapat orang tua yang tidak berkenan mengusulkan hak integrasi anaknya dengan alasan ingin memberikan pelajaran kepada anaknya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Sosialisasi Hak Integrasi kepada Andik;
- Komunikasi dengan orang tua Andik tentang Hak Integrasi;
- Pengusulan Litmas Integrasi, Sidang TPP terkait usulan integrasi, dan pelaksanaan integrasi;

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	90%	100%	111,11%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan}}{\text{Target Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah Andik yang memperoleh hak pengasuhan dibagi dengan jumlah keseluruhan Andik. Pada tahun 2023, terdapat 60 andik yang telah mendapatkan hak pengasuhan dari jumlah keseluruhan andik sebanyak 60 andik. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja sebesar 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka capaian indikator kinerja tersebut sebesar 111,11%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	80%	100%	120%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan di tahun 2023 indikator kinerja tersebut telah tercapai optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	80%	90%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan konseling langsung antara andikpas dengan pengasuh secara rutin.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Sosialisasi Hak Pengasuhan kepada Andik;
- Pelaksanaan konseling secara rutin oleh pengasuh kepada andik;
- Pelaksanaan Bintorwadal atas pelaksanaan kinerja;

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	90%	100%	111,11%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan}}{\text{Target Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,11\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dihitung berdasarkan jumlah Andik yang mengikuti pendidikan dibagi dengan jumlah keseluruhan Andik. Pada tahun 2023, terdapat 60 andik yang telah mengikuti pendidikan formal dan non formal dari jumlah keseluruhan andik sebanyak 60 andik. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 111,11%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	80%	100%	120%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja di tahun 2023 telah tercapai optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	80%	90%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis,

realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100% dan realisasi di tahun 2022 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung melalui pelaksanaan kegiatan PKBM, dan pelatihan ketrampilan dibidang agribisnis, manufaktur, dan jasa.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Sosialisasi program pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan;
- Pelaksanaan PKBM dan pelatihan ketrampilan di bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa
- Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

7. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pengaduan yang diselesaikan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117,65%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Target Persentase pengaduan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117,65\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator persentase pengaduan yang diselesaikan dihitung berdasarkan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah keseluruhan pengaduan. Di tahun 2023, terdapat 14 pengaduan yang telah diselesaikan dari jumlah keseluruhan pengaduan masuk sebanyak 14 pengaduan. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 117,65%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	120%	85%	100%	117,65%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja pada periode 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 117,65%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 yaitu sebesar 100% telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pengaduan yang diselesaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui cepatnya respon terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap seluruh pengaduan yang masuk.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pencegahan gangguan kamtib

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase pencegahan gangguan kamtib}}{\text{Target Persentase pencegahan gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%^*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator persentase pencegahan gangguan kamtib dihitung berdasarkan jumlah gangguan kamtib yang dicegah dibagi dengan jumlah seluruh gangguan Kamtib. Pada tahun 2023, terdapat 27 gangguan kamtib yang dapat dicegah dari total 27 gangguan kamtib. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 125% dengan konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	75%	107,14%	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 75%. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja pada periode 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 sebesar 100% dan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 75%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase pencegahan gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui pelaksanaan Sidak secara rutin maupun insidentil dengan jumlah pelaksanaan sidak di tahun 2023 sebanyak 436 kali .

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	85,06%	100,07%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh WBP}}{\text{Target Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{85,06\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,07\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dihitung berdasarkan jumlah WBP pelaku gangguan Kamtib yang tidak melakukan pengulangan pelanggaran dibagi dengan seluruh WBP pelaku gangguan Kamtib. Ditahun 2023, jumlah WBP yang tidak melakukan pengulangan pelanggaran sebanyak 148 dari total 174 pelanggaran di tahun 2023. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja sebesar 85,06%. Mengacu target di tahun 2023 sebesar 85%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 100,07%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	80,31%	100,39%	85%	85,06%	100,07%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 85,06% meningkat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 80,31%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 yaitu sebesar 85,06% telah mencapai target di tahun 2023 namun belum mencapai target tahun 2024 yaitu sebesar 90%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui Penginputan Reg. F pada SDP Keamanan, dan pelaksanaan sidak secara rutin maupun insidental dengan jumlah pelaksanaan sidak di tahun 2023 sebanyak 436 kali .

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}}{\text{Target Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dihitung dari jumlah pemulihan

kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib dibagi dengan jumlah keseluruhan gangguan Kamtib yang terjadi. Di tahun 2023, terdapat 27 kegiatan pemulihan gangguan Kamtib dari total 27 gangguan kamtib. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 125% dengan penerapan Konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	100%	120%*	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja pada periode 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 10% telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Melaksanakan rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonsiliasi terhadap seluruh gangguan kamtib.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

8. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,65%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar}}{\text{Target Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117,65\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah keseluruhan pengaduan. Di tahun 2023, terdapat 14 pengaduan yang telah diselesaikan dari jumlah keseluruhan pengaduan masuk sebanyak 14 pengaduan. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 117,65%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	120%	85%	100%	117,65%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja pada periode 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 117,65%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui cepatnya respon terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap seluruh pengaduan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Target Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dihitung berdasarkan jumlah gangguan kamtib yang dicegah dibagi dengan jumlah seluruh gangguan Kamtib. Pada tahun 2023, terdapat 27 gangguan kamtib yang dapat dicegah dari total 27 gangguan kamtib. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 125% dengan konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	75%	107,14%	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022

yaitu sebesar 75%. Hal ini menunjukkan realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah tercapai optimal realisasi sebesar 100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung melalui pelaksanaan Sidak secara rutin maupun insidental dengan jumlah sidak di tahun 2023 sebanyak 436 kali .

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	85,06%	100,07%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh WBP}}{\text{Target Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{85,06\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,07\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dihitung

berdasarkan jumlah WBP pelaku gangguan Kamtib yang tidak melakukan pengulangan pelanggaran dibagi dengan seluruh WBP pelaku gangguan Kamtib. Pada tahun 2023, jumlah WBP yang tidak melakukan pengulangan pelanggaran sebanyak 148 dari total 174 pelanggaran di tahun 2023. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja sebesar 85,06%. Mengacu target di tahun 2023 sebesar 85%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 100,07%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	80,31%	100,39%	85%	85,06%	100,07%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 85,06% meningkat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 80,31%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 85,06% telah mencapai target tahun 2023 namun belum mencapai target di tahun 2024 yaitu sebesar 90%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui Penginputan Reg. F pada SDP Keamanan, dan pelaksanaan sidak secara rutin maupun insidental dengan jumlah pelaksanaan sidak di tahun 2023 sebanyak 436 kali .

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan

- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}}{\text{Target Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dihitung dari jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib dibagi dengan jumlah keseluruhan gangguan Kamtib yang terjadi. Di tahun 2023, terdapat 27 kegiatan pemulihan gangguan Kamtib dari total 27 gangguan kamtib. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 125% dengan penerapan konversi menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	100%	120%*	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 sama dengan realisasi di tahun 2022. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja pada periode 2023 telah tercapai optimal dengan persentase capaian sebesar 120%*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 100% telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Melaksanakan rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonsiliasi terhadap seluruh gangguan kamtib.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

9. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak, sesuai dengan standar

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak, sesuai dengan standar	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase pemenuhan layanan makanan bagi WBP}}{\text{Target Persentase pemenuhan layanan makanan bagi WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak, sesuai dengan standar dihitung berdasarkan jumlah WBP yang mendapatkan layanan makanan dibagi dengan jumlah keseluruhan WBP. Pada tahun 2023, seluruh WBP telah mendapatkan layanan pemenuhan makanan dengan jumlah 9.584 WBP. Dari data tersebut,

diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 125% dengan penerapan konversi menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak, sesuai dengan standar	75%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak, sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024 dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung penyelenggaraan bahan makanan sesuai standar dan secara rutin berdasarkan jumlah hunian dan dilaporkan setiap hari pada aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Penyelenggaraan bahan makanan sesuai standar
- Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan/ Narapidana /Anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase WBP yang mendapat layanan kesehatan}}{\text{Target Persentase WBP yang mendapat layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{94\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106,38\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana /anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dihitung berdasarkan jumlah WBP yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan WBP. Pada tahun 2023, seluruh WBP telah mendapatkan layanan kesehatan dengan jumlah 9.584 WBP. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 94%, maka capaian indikator kinerja tercapai sebesar 106,38%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	94%	100%	106,38%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase tahanan/narapidana/anak, mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui penyelenggaraan pemberian pengobatan, dan vitamin bagi WBP, pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan kegiatan kontrol kebersihan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Ketersediaan obat-obatan dan vitamin bagi WBP;
- Layanan kesehatan di klinik oleh tenaga kesehatan;
- Kerjasama dengan lembaga/instansi kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan kepada WBP;
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu Hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu Hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase WBP (ibu Hamil dan menyusui) mendapat layanan maternal}}{\text{Target Persentase WBP (ibu Hamil \& menyusui) mendapat layanan maternal}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{97\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 103,09\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dihitung berdasarkan jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapatkan layanan kesehatan maternal dibagi dengan seluruh WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui). Pada tahun 2023, seluruh WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) telah mendapat layanan kesehatan maternal dengan jumlah 7 WBP. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 97%,

maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 103,09%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu Hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	97%	100%	103,09%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu Hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui penyelenggaraan pemberian pengobatan, dan vitamin bagi WBP, pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan kegiatan kontrol kebersihan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Ketersediaan obat-obatan dan vitamin bagi WBP;
- Layanan kesehatan di klinik oleh tenaga kesehatan;
- Kerjasama dengan lembaga/instansi kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan kepada WBP;

- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Target Persentase WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana /anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dihitung berdasarkan jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi dengan jumlah seluruh WBP yang mengalami gangguan mental. Ditahun 2023, seluruh WBP yang mengalami gangguan mental telah mendapat penanganan dan layanan kesehatan dengan jumlah 23 WBP. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu target di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 125% dengan penerapan konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	80%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana /Anak, yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui penyelenggaraan pemberian pengobatan, dan vitamin bagi WBP, pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan kegiatan kontrol kebersihan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Ketersediaan obat-obatan dan vitamin bagi WBP;
- Layanan kesehatan di klinik oleh tenaga kesehatan;
- Kerjasama dengan lembaga/instansi kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan kepada WBP;
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

e. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase WBP lansia yang mendapat layanan kesehatan}}{\text{Target Persentase WBP lansia yang mendapat layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117,65\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah WBP lansia yang mendapat layanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh WBP lansia. Pada tahun 2023, seluruh WBP lansia telah mendapat layanan kesehatan dengan WBP lansia sebanyak 163 WBP. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target tahun 2023 yaitu

sebesar 85%, maka capaian indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 117,65%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	85%	100%	117,65%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024. Realisasi pada periode 2023 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui penyelenggaraan pemberian pengobatan, dan vitamin bagi WBP, pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan kegiatan kontrol kebersihan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Ketersediaan obat-obatan dan vitamin bagi WBP;
- Layanan kesehatan di klinik oleh tenaga kesehatan;
- Kerjasama dengan lembaga/instansi kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan kepada WBP;
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

f. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan/ Narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase WBP Disabilitas yang mendapat layanan kesehatan}}{\text{Target Persentase WBP Disabilitas yang mendapat layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117,65\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana /anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah WBP disabilitas yang mendapat layanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh WBP disabilitas. Ditahun 2023, Seluruh WBP penyandang disabilitas telah mendapatkan layanan kesehatan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 WBP disabilitas. Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu target tahun 2023 sebesar 85%, maka capaian indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 117,65%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	85%	100%	117,65%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 sebesar 100% telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase tahanan/ narapidana /anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung melalui penyelenggaraan pemberian pengobatan & vitamin bagi WBP, penyuluhan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana seperti kursi roda, tongkat siku, dan alat bantu jalan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Ketersediaan obat-obatan dan vitamin bagi WBP dan Sarpras untuk memudahkan WBP penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat siku, dan alat bantu jalan;
- Layanan kesehatan di klinik oleh tenaga kesehatan;
- Kerjasama dengan lembaga/instansi kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan kepada WBP;
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

g. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	66,12%	82,65%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular}}{\text{Target Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{66,12\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 82,65\%$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif

(berhasil sembuh) dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari jumlah WBP yang berhasil ditekan jumlah virus HIV-AIDS (pengobatan) dibagi dengan jumlah WBP yang mengidap HIV-AIDS dan jumlah WBP yang berhasil sembuh TB Positif dibagi dengan jumlah WBP yang mengidap TB Positif. Data realisasi indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

HIV-AIDS			TB Positif			Realisasi
Jumlah WBP	Pengobatan	%	Jumlah WBP	Sembuh	%	
A	B	$C = \frac{B}{A}$	D	E	$F = \frac{E}{D}$	$G = \frac{C+F}{2}$
54	52	96,30%	153	55	35,95%	66,12%

Dari data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 66,12%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 82,65%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	80%	66,12%	82,65%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 66,12%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 sebesar 66,12% masih belum melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan tb positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tidak optimalnya hasil capaian indikator kinerja disebabkan proses penyembuhan TB Positif membutuhkan durasi pengobatan sekitar 6 – 9 bulan sehingga WBP terkena TB Positif dipertengahan tahun masih belum dapat sembuh pada periode tahun yang sama. Kemudian terdapat WBP yang tidak secara rutin menjalani pengobatan lengkap selama 6-9 bulan sehingga masih mengidap TB Positif saat dilakukan tes ulang. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja telah dilakukan pelaksanaan pengawasan pemberian pengobatan, dan vitamin bagi WBP, pelaksanaan penyuluhan kesehatan, pemberian terapi OAT rutin dengan PMO, skrining TB dan Mobile CVT rutin terhadap tahanan/narapidana baru.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Ketersediaan obat & vitamin bagi WBP, pemberian terapi OAT rutin dengan PMO, skrining TB & Mobile CVT rutin terhadap tahanan/narapidana baru
- Layanan kesehatan di klinik oleh tenaga kesehatan
- Kerjasama dengan lembaga/instansi kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan kepada WBP
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

h. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	120%*

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase perubahan kualitas hidup WBP Narkotika}}{\text{Target Persentase perubahan kualitas hidup WBP Narkotika}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{27\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 370,37\%$$

$$\text{Konversi Capaian} = 120\%*$$

Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkotika dihitung berdasarkan jumlah WBP Narkotika yang menjalani kegiatan rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup dibagi dengan jumlah seluruh WBP Narkotika yang menjalani kegiatan rehabilitasi. Pada tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran WHOQoL pada 650 WBP Peserta Rehabilitasi Tahun 2023, keseluruhan peserta rehabilitasi telah mengalami peningkatan kualitas hidup. Dari

data tersebut, diketahui realisasi indikator kinerja mencapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 27%, maka capaian atas indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 370,37% dengan penerapan konversi capaian maksimal menjadi 120%*.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkoba	25%	Tidak ditargetkan pada PK 2022	-	27%	100%	120%*

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023, realisasi di periode 2023 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkoba	23%	25%	27%	29%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja pada periode 2023 sebesar 100% dan telah melampaui target di tahun 2023 dan target di tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkoba hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didukung melalui penyelenggaraan kegiatan rehab medis dan rehab sosial pada WBP penyalahgunaan Narkoba.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan program rehabilitasi kepada WBP penyalahgunaan Narkoba;
- Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi;
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemasyarakatan secara rutin pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

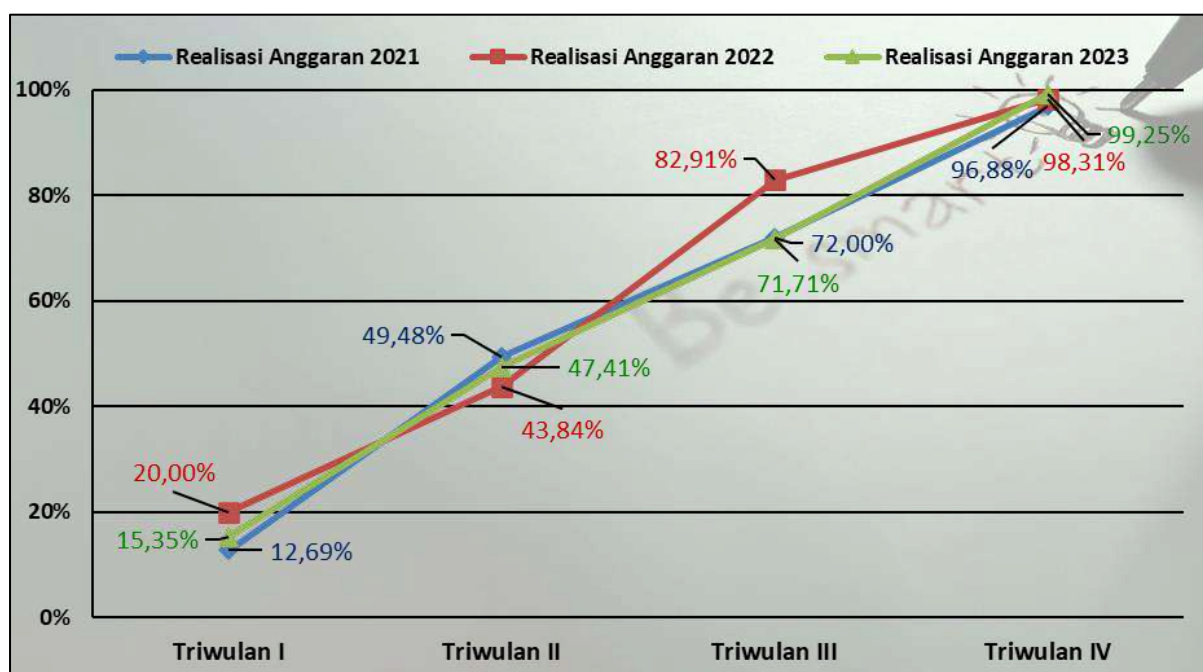
REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	DIPA / PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	Kantor Wilayah Banten	354.654.096.000	352.009.990.176	99,25%
1	Setjen - Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	23.215.698.000	23.205.898.969	99,96%
2	Administrasi Hukum Umum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2.260.316.000	2.259.786.856	99,98%
3	Kekayaan Intelektual Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.730.303.000	1.728.154.231	99,88%
4	Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	373.635.000	373.635.000	100%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah & Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	2.511.020.000	2.502.681.000	99,67%
6	Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	235.484.000	235.483.350	100%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	219.371.000	219.371.000	100%
8	Keimigrasian Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	39.429.477.000	38.307.975.005	97,16%
9	Pemasyarakatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	284.678.792.000	283.177.004.765	99,47%

REALISASI ANGGARAN YEAR ON YEAR (YoY)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

No	Dipa / Program	Realisasi Anggaran					
		2021		2022		2023	
		Pagu	(%)	Pagu	(%)	Pagu	(%)
A	Kantor Wilayah Banten	267.172.689.000	96,88%	350.701.938.000	98,31%	354.654.096.000	99,25%
1	Setjen - Dukungan Manajemen	17.158.827.000	99,37%	16.598.879.937	99,59%	23.215.698.000	99,96%
2	Administrasi Hukum Umum	2.066.480.000	99,86%	1.964.034.532	99,93%	2.260.316.000	99,98%
3	Kekayaan Intelektual	930.915.000	99,54%	1.054.645.682	99,83%	1.730.303.000	99,88%
4	Peraturan Perundang-undangan	262.000.000	100%	262.000.000	100%	373.635.000	100,00%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.014.056.000	99,77%	1.714.585.949	99,35%	2.511.020.000	99,67%
6	Hak Asasi Manusia	233.984.000	100%	224.982.000	100%	235.484.000	100,00%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	199.428.000	99,99%	180.218.000	100%	219.371.000	100,00%
8	Keimigrasian	37.574.374.000	79,82%	31.901.556.065	88,80%	39.429.477.000	97,16%
9	Pemasyarakatan	206.732.625.000	99,70%	290.867.108.592	99,38%	284.678.792.000	99,47%



Berdasarkan data pada tabel yang telah disajikan, diketahui bahwa capaian realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada periode 2023 yaitu sebesar 99,25%. Kemudian jika melihat realisasi anggaran secara *year on year* (yoy) realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada 2023 meningkat sebesar 0,94% dibandingkan periode tahun 2022 sebesar 98,31%. Peningkatan tersebut merupakan dampak positif atas pelaksanaan evaluasi kinerja

anggaran secara berkala guna percepatan dan akselerasi kinerja anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Banten.

KINERJA ANGGARAN

KINERJA ANGGARAN TAHUN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	DIPA / PROGRAM / SATKER	NILAI IKPA	NILAI SMART	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN (%)
A	B	C	D	E= (Cx40%)+(Dx60%)
	Kantor Wilayah Banten	97,05	97,17	97,12
1	Setjen - Dukungan Manajemen	97,85	97,84	97,84
2	Administrasi Hukum Umum	97,22	99,21	98,41
3	Kekayaan Intelektual	98,71	97,81	98,17
4	Peraturan Perundang-undangan	96,07	96,40	96,27
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	95,55	92,37	93,64
6	Hak Asasi Manusia	99,47	99,26	99,34
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	99,59	99,83	99,73
8	Keimigrasian	95,49	95,92	95,75
	Divisi Keimigrasian	100,00	98,08	98,85
	Kanim Tangerang	94,97	91,10	92,65
	Kanim Cilegon	90,92	95,90	93,91
	Kanim Serang	96,07	98,59	97,58
9	Pemasyarakatan	97,11	97,32	97,24
	Divisi Pemasyarakatan	97,06	98,20	97,74
	LP Kelas I Tangerang	94,99	95,48	95,28
	LP Kelas IIA Pemuda Tangerang	100,00	99,34	99,60
	LP Perempuan Kelas IIA Tangerang	95,23	97,18	96,40
	LP Kelas IIA Tangerang	92,17	92,54	92,39
	LPKA Kelas I Tangerang	97,02	98,90	98,15
	LP Terbuka Ciangir	98,92	99,26	99,12
	LP Kelas II Serang	95,59	87,99	91,03
	LP Kelas IIA Cilegon	98,97	94,88	96,52
	LP Kelas III Rangkasbitung	99,17	99,38	99,30
	Rutan Kelas I Tangerang	100,00	99,29	99,57
	Rutan Kelas IIB Serang	96,51	99,18	98,11
	Rutan Kelas IIB Pandeglang	96,65	99,12	98,13

NO	DIPA / PROGRAM / SATKER	NILAI IKPA	NILAI SMART	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN (%)
A	B	C	D	E= (Cx40%)+(Dx60%)
	Bapas Tangerang	96,17	98,83	97,77
	Bapas Kelas II Serang	98,15	98,80	98,54
	Bapas Kelas II Ciangir	100,00	99,28	99,57
	Rupbasan Kelas II Serang	94,33	96,74	95,78

Kemudian dari data kinerja anggaran yang telah disajikan, diketahui bahwa nilai IKPA dilingkungan Kantor Wilayah Banten (28 DIPA) pada periode 2023 mencapai 97,05 dengan nilai SMART mencapai 97,17. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat diukur capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Banten yang dihitung dari jumlah nilai IKPA dengan bobot sebesar 60% dan nilai SMART dengan bobot sebesar 40%. Hasil capaian kinerja anggaran Kantor Wilayah Banten pada periode 2023 dari penilaian bobot IKPA dan SMART mencapai 97,12.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Banten telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan publik. Inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Banten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut Inovasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama Tahun 2023, antara lain :

INOVASI KANTOR WILAYAH BANTEN TAHUN 2023

JAWARA New Version



TEROBOSAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- ❖ Jawaara mengintegrasikan seluruh Pelayanan Hukum dan HAM yang dapat diakses kapan pun & dimanapun sehingga Masyarakat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi & pelayanan Hukum dan HAM
- ❖ Manfaat Aplikasi JAWARA menutup celah Korupsi , Pungli , dan Gratifikasi

M-HUKDIS



TEROBOSAN PEMBINAAN HUKUMAN DISIPLIN

M-Hukdis pada Aplikasi Sikap Jawaara merupakan media digitalisasi pelaksanaan Pembinaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sehingga evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilakukan secara optimal

APOA - JAWARA



TEROBOSAN PENGAWASAN ORANG ASING

Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA Jawaara) berbasis web yang dapat diakses melalui browser digunakan sebagai sistem pelaporan orang asing untuk pemilik hotel atau penginapan dan pemilik mess perusahaan guna melaporkan orang asing yang menginap sehingga memudahkan pihak Keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing

PEPITO



TEROBOSAN LAYANAN KONSULTASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Aplikasi Pesan Pintar Otomatis (PEPITO) Kekayaan Intelektual adalah sebuah aplikasi balas pesan otomatis bagi pengguna WhatsApp. Aplikasi akan membalas pesan secara otomatis ketika pengguna memilih menu atau perintah tertentu untuk mendapatkan informasi seputar Kekayaan Intelektual

POSKO BANGKUMIS



TEROBOSAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM

Pos Konsultasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin/ tidak mampu merupakan program yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah Banten bersama Pemerintah Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum sehingga akses terhadap keadilan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

SIGUBOOK



TEROBOSAN PENCATATAN TAMU

- ❖ Mempermudah pengunjung dalam mengisi daftar tamu
- ❖ Mempermudah dalam pengumpulan dan penyortiran data pengunjung
- ❖ Membantu mengetahui jenis layanan yang sering dikunjungi

FACE SMART ACCESS LOCK



TEROBOSAN KEAMANAN AKSES PINTU MASUK

Kunci pintar otomatis berbasis sistem yang dapat merekam seseorang saat membuka atau mengunci pintu dengan deteksi wajah sehingga dapat meningkatkan keamanan dan berperan dalam monitoring disiplin pegawai serta sterilisasi ruangan dari pihak asing.

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada tahun 2023 ini sejalan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih di Lingkungan Kantor Wilayah Banten selama tahun 2023 diantaranya :

1. Penghargaan Anugerah Sahabat PWI Banten Tahun 2023



2. Penghargaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang atas Apresiasi Kerja Sama dan Dukungan Pelayanan Eazy Passport di KPKNL Tangerang I



3. Penghargaan Kanwil DJKN Provinsi Banten kepada Kanwil Banten atas Koordinator Wilayah dengan Tata Kelola Barang Milik Negara Terbaik Tahun 2022 di Provinsi Banten



4. Penghargaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang kepada Kanwil Banten sebagai Satuan Kerja dengan Penatausahaan BMN Terbaik Tahun 2022 di Wilayah Kerja KPKNL Serang



5. Penghargaan Ditjen Kekayaan Intelektual kepada Kanwil Banten sebagai Terbaik I pada Subkategori Kinerja Anggaran di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023



6. Penghargaan Ditjen Kekayaan Intelektual kepada Kanwil Banten sebagai Kantor Wilayah dengan Jumlah Pelaksanaan MIPC Terbanyak Tahun 2023



7. Penghargaan Ditjen HAM kepada Kanwil Banten sebagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong 8 Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2022



8. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Badan Publik “Informatif”



9. Penghargaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten atas Partisipasi Aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)



10. Penghargaan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Kanwil Banten sebagai Terbaik II Persentase Pertumbuhan, Pencapaian Target, dan Realisasi PNPB Tahun 2021 – 2023



11. Penghargaan It Works.id kepada Kanwil Banten sebagai TOP Digital Implementation 2023



12. Penghargaan Kanwil DJPB Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Kategori Satker UAPPA-W Besar Penghargaan Atas Hasil Telaahan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Banten Tahun 2022



13. Penghargaan Kanwil DJPB Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Peringkat Kedua Satker dengan capaian IKPA tertinggi bulan Oktober 2023 Kategori Pagu Kecil <25M dengan nilai IKPA 100



14. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kanwil Banten atas Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023



15. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Banten atas Partisipasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Instansi Vertikal di Provinsi Banten



BAB IV

PENUTUP

Berisi kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta strategi rencana kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

PENGAYOMAN

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Wilayah. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator kinerja, realisasi anggaran dan kinerja anggaran, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada periode tahun 2023 Kantor Wilayah Banten mengemban 22 Sasaran kegiatan dengan 61 indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Untuk mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Banten mendapat alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 354.654.096.000,- pada 28 DIPA dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.
2. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten dari jumlah 61 Indikator kinerja, sebanyak 59 indikator kinerja yang telah tercapai melebihi target dan 2 indikator kinerja yang belum tercapai optimal. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten pada tahun 2023 telah tercapai dengan baik dengan rata-rata capaian sebesar 115,16%. Kemudian dari sisi anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada periode 2023 mencapai 99,25% atau sejumlah Rp 352.009.990.176,- , dan nilai kinerja anggaran berdasarkan SMART dan IKPA mencapai 97,12 (skala 100).
3. Berdasarkan hasil pengukuran capaian dari indikator kinerja dan realisasi anggaran maka diketahui *performance* Kantor Kementerian Hukum dan HAM Banten periode 2023 mencapai 104% dengan persentase efisiensi sumber daya sebesar 15,91%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode 2023 kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten secara keseluruhan sangatlah produktif.
4. Hasil kinerja produktif Kantor Wilayah Banten tahun 2023 dapat terlihat dari terobosan 7 inovasi di tahun 2023 guna kemudahan layanan dan percepatan pelaksanaan kinerja. Kemudian kontribusi PNBP atas layanan AHU, Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, dan produktivitas narapidana dengan jumlah PNBP tahun 2023 sebesar Rp. 133,36 Milyar,-

5. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Banten telah menghasilkan prestasi terbaik yang tercermin pada 15 penghargaan yang telah diraih pada periode tahun 2023 ini.

SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada tahun 2023 sehingga pada periode tahun 2024 mendatang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dapat tercapai optimal sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karenanya, perlu menjadi atensi Kepala Satuan Kerja dan Seluruh Jajaran dilingkungan Kantor Wilayah Banten diantaranya sebagai berikut :

1. Impelementasikan Reformasi Birokrasi yang berdampak dengan berperan aktif memenuhi kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan.
2. Khusus di jajaran Pemasyarakatan, guna mengoptimalkan indikator kinerja Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana dan Penanganan Penyakit Menular maka segera benahi dan lakukan percepatan pemenuhan perizinan penyelenggaraan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, berkoordinasi dengan stakeholder terkait serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja.
3. Lakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara rutin dan berkala atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran dengan berorientasi hasil, dan berdampak.
4. Tingkatkan sinergitas dan kolaborasi secara intens dengan aparat penegak hukum, forkopimda, Akademisi dan stakeholder guna mendukung pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi.
5. Tingkatkan *sense of urgency* dan persiapkan rencana kontingensi dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan atas peristiwa *force majeure*.
6. Peningkatan dan Penguatan kompetensi SDM sesuai core value ASN Ber-AKHLAK yaitu ASN yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.



LAMPIRAN

PENGAYOMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15,256,079,000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 15,256,079,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.260.316.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.260.316.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 Orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Program	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 99.324.945.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 183.363.631.000

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.191.517.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.191.517.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekajahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	143 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.730.303.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.730.303.000,-

Jakarta,

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 373,635,000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 373,635,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto

NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muallimin Abdi

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 235,484,000
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 235,484,000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 143.455.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 143.455.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.200.755.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.200.755.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Esatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

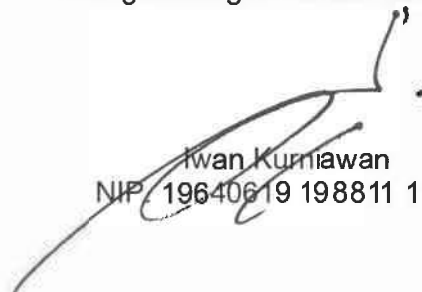
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM


Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Banten


Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

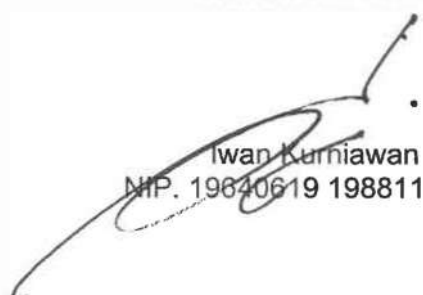
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 219.371.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 219.371.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
 Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
 NIP. 19840619 198811 1 001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
 NIP. 19660329 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 19660329 199003 1 001